

SKRIPSI

**ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN KETERKAITAN
SPASIALEKONOMI ANTAR KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI ACEH**



Disusun Oleh:

**Rahmat Alfinda
NIM. 190604063**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Alfinda
NIM : 190604063
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 November 2023
Yang Menyatakan,



Rahmat Alfinda

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN
KETERKAITAN SPASIALEKONOMI ANTAR
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH**

Disusun Oleh:

Rahmat Alfinda
NIM. 190604063

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 197204281999031005

Pembimbing II

Uliya Azra, SE., M.Si
NIP. 199410022022032001 1

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah,

Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 1983070920140320002

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN KETERKAITAN SPASIAL
EKONOMI ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH**

Rahmat Alfinda
NIM. 190604063

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 15 Desember 2023 M
2 Jumadil Akhir 1445 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

AM

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 197204281999031005

Sekretaris

UA

Uliva Azra, SE., M.Si
NIP. 199410022022032001

Penguji I

KA

Dr. Khairul Amri S.E., M.Si
NIDN. 0106077507

Penguji II

RM

Rachmi Meutia, S.E., S.pd.I., M.Sc
NIP. 198803192019032013



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Hafis Firdani, M.Ec

NIP. 198106252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rahmat Alfinda
NIM : 190604063
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi
E-mail : 190604063@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir K KU Skripsi

yang berjudul: **Analisis sektor unggulan dan keterkaitan Spasial ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh**

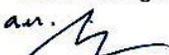
Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 Desember 2023

	Mengetahui	
Penulis	Pembimbing I	Pembimbing II
		
Rahmat Alfinda NIM: 190604063	Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si NIP. 197204281999031005	Uliya Azra, SE., M.Si NIP. 199410022022032001

MOTTO PERSEMBAHAN

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Surat Al-Mujadalah ayat: 11).

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya: "Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." (HR Muslim, no. 2699).

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua surgaku, Ayah dan Ibu serta Keluarga tercinta yang selalu menjadi tempat ternyaman untuk pulang. Untuk orang-orang yang kusayangi, dan untuk seluruh pejuang pendidikan yang akan menjadi Bapak generasi ummat dan Ibu peradaban.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, sang pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan serta seperangkat aturan Nya. Berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Sektor Unggulan dan Keterkaitan Spasial Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh”** dengan baik. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Adapun penulis menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ribuan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Hafas Furqani M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu penulis, baik dukungan moril maupun sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Fithriady, Lc, MA selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu penulis, baik dukungan moril maupun sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Cut Dian Fitri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku ketua program studi Ilmu Ekonomi dan Ana Fitria, SE., M.Sc selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.

4. Hafiizh Maulana, SP., S.HI., ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ilmu Ekonomi.
5. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku pembimbing I dan ibu Uliya Azra, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan banyak masukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Rachmi Meutia, S.E., S.Pd.I., M.Sc selaku Penasehat Akademik (PA) penulis serta Seluruh Dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negri Ar-Raniry, khususnya Program Studi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan ilmu, pengalaman, arahan serta perhatiannya kepada penulis selama menempuh pendidikan program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Ekonomi.
7. Ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Supardi Zulkifli dan Ibu Afrida A. samat yang telah menjadi orang tua terhebat sejagat Raya, telah bersusah payah membesarkan dan merawat penulis serta tidak pernah merasa letih dan lelah dalam memberikan kasih sayang dan dukungan yang luar biasa kepada penulis baik itu materi maupun doa-doa terbaiknya. Semoga menjadi amal jariah yang tidak pernah putus untuk keduanya. Terimakasih juga buat semua keluarga besar

yang selalu memberikan doa, motivasi serta kasih sayang yang tentu tidak akan bisa terbalaskan dengan apapun sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

8. Sahabat suka-duka selama perkuliahan dan seluruh keluarga besar teman-teman di IPPELMASRA. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat terbaik Safwan n sulya, dan Zahlianur serta sahabat-sahabat lainnya yang selalu mensupport hingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu atas segala dukungan, semangat dan motivasinya kepada penulis.
9. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini. Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga yang kita amalkan mendapat ridho-Nya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 10 November 2023
Penulis,

Rahmat Alfinda

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau

diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف
haulā : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā

ي	Kasrah dan ya	Ī
ي	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ
ramā : رَمَى
qīla : قِيلَ
yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

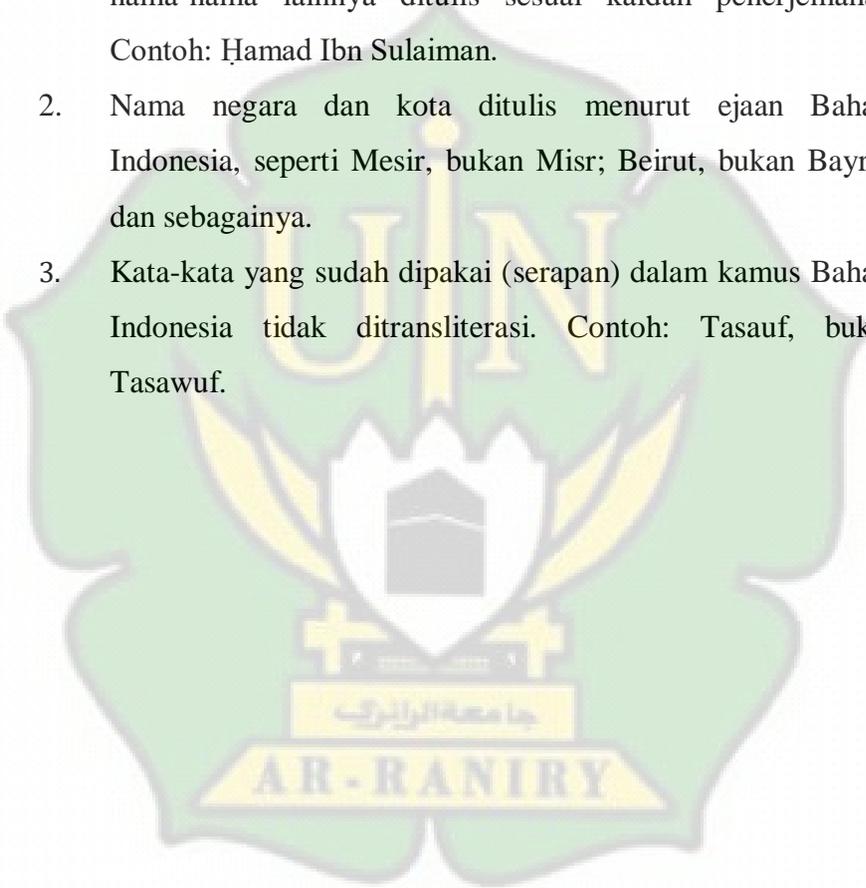
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfāl/ raudatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul Munawwarah
Ṭalḥah : طَلْحَةَ

**Catatan:
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Rahmat Alfinda
NIM : 190604063
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi
Judul : Analisis Sektor Unggulan dan Keterkaitan Spasial Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
Pembimbing II : Uliya Azra, SE., M.Si
Kata Kunci : Sektor Unggulan, Spasial ekonomi, *Typology Klassen, Shift share, Location Quotient, Moran Scatterplot.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor unggulan yang ada di Provinsi Aceh, serta menganalisis keterkaitan spasial ekonomi antar wilayah di kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, data yang digunakan pada penelitian ini adalah data PDRB dari 23 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah, *Shift Share, Typologi Klassen, Location Quotient, dan Moran Scatterplot.* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sektor unggulan yang ada di Provinsi Aceh terdapat 8 sektor yang menjadi sektor unggulan atau sektor basis, dan 9 sektor lainnya termasuk dalam kategori non basis atau non unggulan. Semua sektor unggulan ini punya kontribusi yang signifikan terhadap PDRB, Hasil ini berdasarkan analisis *Shift Share* dan *Typologi Klassen* terhadap PDRB Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2018-2022. Hasil dari analisis *Shift-Share*, Nilai Total (Dij) sebesar 14.123.150 triliun Rupiah menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2018-2022 perekonomian Provinsi Aceh mengalami pertambahan nilai absolut atau mengalami kenaikan kinerja perekonomian daerah sebesar 14.123.150 triliun Rupiah Peningkatan ini disumbangkan oleh semua sektor ekonomi. Nilai indeks *Moran's* dari variable PDRB pada tahun 2022 bernilai positif $0.264 > 0$ menunjukkan bahwa pola data membentuk kelompok (*Cluster*), dan mengindikasi terjadinya interaksi spasial ekonomi antar Kabupaten/Kota Provinsi Aceh pada tahun 2018-2022.

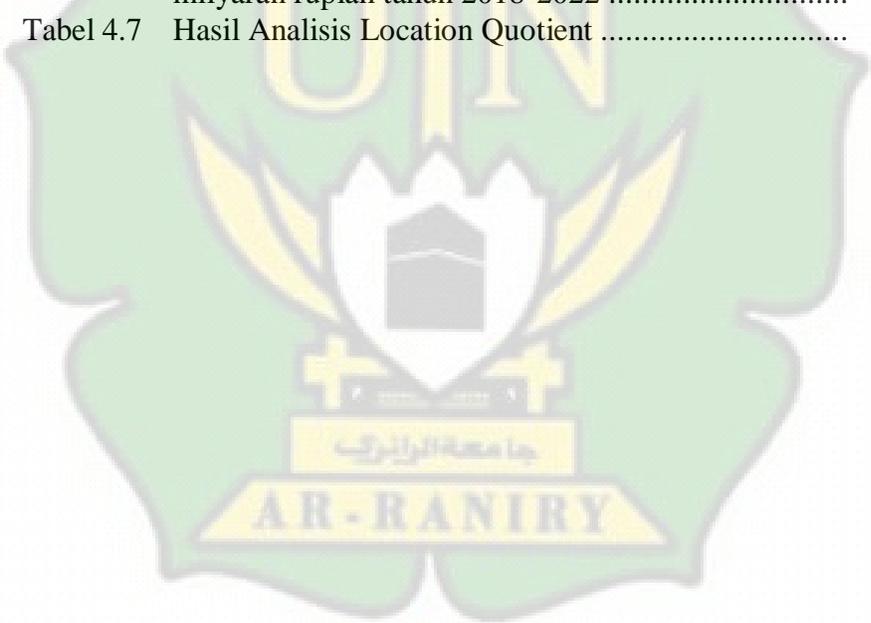
DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian.....	18
1.4 Manfaat Penelitian.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Sektor unggulan.....	19
2.2 Pembangunan ekonomi daerah	22
2.2.1 Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah.....	26
2.2.2 Peran swasta dalam pembangunan ekonomi daerah	27
2.2.3 Teori sektor pemberian alam	28
2.2.4 Faktor-faktor yang membuat daerah memiliki sektor unggulan.....	31
2.3 Teori sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi wilayah	32
2.3.1 Analisa Location Quotient (LQ)	32
2.3.2 Analisa Shift Share	33
2.3.3 Analisa menurut Klassen Typology	35
a. Pengertian Spasial	37

b. Penelitian terdahulu	41
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis penelitian	46
3.2 Jenis dan sumber data	46
3.3 Defenisi operasional dan pengukuran variabel	47
3.3.1 PDRB	47
3.3.2 Pertumbuhan ekonomi	49
3.3.3 Sektor-sektor ekonomi	49
3.4 Model analisis data	51
3.4.1 Moran scatterplot	51
3.4.2 Analisis Location Quotient.....	53
3.4.3 Analisis Shift Share	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Deskripsi Penelitian	57
4.1.1 Letak Geografis dan Kependudukan	57
4.2 Wilayah Administrasi dan Ketenagakerjaan.....	59
4.2.1 Struktur ekonomi dan produk domestik regional bruto (PDRB)	64
4.3 Hasil Analisis Data	64
4.3.1 Hasil Analisis Typologi Klassen	66
4.3.2 Hasil Analisis Shift-Share	71
4.3.3 Analisis Location Quotient.....	76
4.3.4 Clustering berdasarkan analisis Typologi Klassen	78
4.3.5 Hasil Analisis Spasial	78
4.3.5.1 Hasil Analisis Moran Scatterplot.....	78
4.3.5.2 Hasil Analisis Histogram	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	92

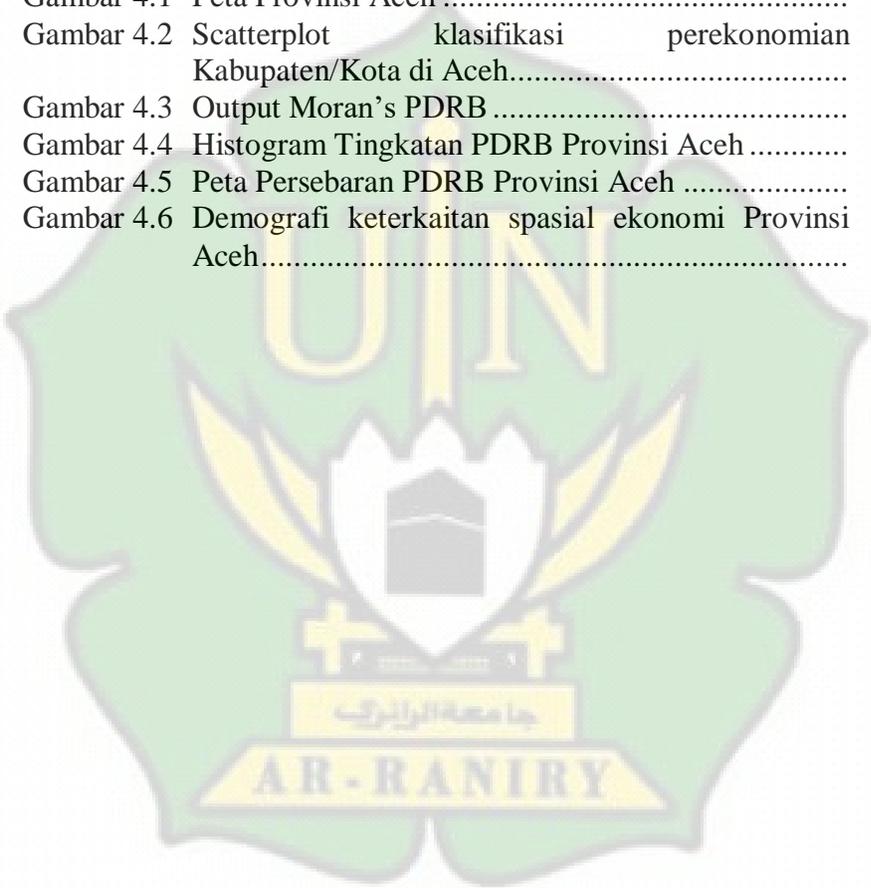
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	PDRB Provinsi Aceh atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 menurut lapangan usaha.....	6
Tabel 4.1	Kepadatan penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2017-2018	41
Tabel 4.2	Wilayah Administrasi pemerintahan Provinsi Aceh ..	57
Tabel 4.3	Peranan PDRB Provinsi Aceh atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha 2018-2022.....	60
Tabel 4.4	Hasil pengolahan data analisis Typologi Klassen sektor unggulan Provinsi Aceh.....	62
Tabel 4.5	Kesimpulan hasil analisis Typologi Klassen.....	65
Tabel 4.6	Hasil Analisis Shift Share provinsi Aceh dalam milyaran rupiah tahun 2018-2022	66
Tabel 4.7	Hasil Analisis Location Quotient	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pertumbuhan ekonomi Indonesia Tw I-Tw IV tahun 2021-2023.....	3
Gambar 1.2	Pertumbuhan dan kontribusi PDRB menurut pulau Tw I 2023.....	5
Gambar 4.1	Peta Provinsi Aceh	44
Gambar 4.2	Scatterplot klasifikasi perekonomian Kabupaten/Kota di Aceh.....	77
Gambar 4.3	Output Moran's PDRB	79
Gambar 4.4	Histogram Tingkatan PDRB Provinsi Aceh	81
Gambar 4.5	Peta Persebaran PDRB Provinsi Aceh	82
Gambar 4.6	Demografi keterkaitan spasial ekonomi Provinsi Aceh.....	83



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia terdiri dari beberapa wilayah yang memiliki struktur perekonomian yang beraneka ragam. Struktur ekonomi dapat dilihat dari peran atau kontribusi dari masing-masing sektor perekonomian yang ada di Indonesia. Ekonomi wilayah di Indonesia dipengaruhi oleh potensi yang dimiliki wilayah itu sendiri yaitu sumber daya alam seperti tanah, iklim, hasil tambang, hasil laut dan sumber daya manusia seperti tenaga kerja yang berpendidikan dan memiliki keterampilan untuk dapat mengolah SDA yang ada. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap solid ditengah perlambatan ekonomi global serta harga komoditas ekspor utama yang menurun, dipengaruhi stabilnya aktivitas perekonomian Indonesia. Hal ini tercermin dari semakin tingginya mobilitas penduduk, terjaganya stabilitas daya beli masyarakat, terkendalinya inflasi, tetap kuatnya kinerja ekspor impor, serta aktivitas produksi yang masih stabil.

Kondisi fiskal Indonesia tetap terjaga sejalan dengan pertumbuhan signifikan pada pendapatan negara, dan belanja negara yang meningkat. Pendapatan negara dan hibah tumbuh 29,0% (YoY) menjadi sebesar 647,2 triliun rupiah atau sebesar 26,3% dari pagu APBN (2023). Kinerja tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan dalam negeri, penerimaan perpajakan, dan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Sementara itu, belanja negara mencapai 518,7 triliun rupiah atau tumbuh 10,5% (YoY). Realisasi

belanja pemerintah pusat mencapai 15,5% dari APBN, sementara TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) mencapai 21,0% dari APBN. Realisasi TKD pada triwulan I tahun 2023 menurun 2,9% (YoY) yang dipengaruhi oleh turunnya realisasi DAU (Dana Alokasi Umum) dan Dana Otsus yang belum terealisasi. Berdasarkan capaian tersebut, anggaran hingga Maret 2023 berada pada kondisi surplus sebesar 128,5 triliun rupiah atau sekitar 0,6% terhadap PDB (Produk Domestik Brutto). Dengan perkembangan tersebut, posisi utang pemerintah mencapai 7.879,1 triliun rupiah atau sebesar 39,2% terhadap PDB, (BPS, Diolah).

Perekonomian Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mengalami perlambatan setelah mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022. Kebangkitan perekonomian Tiongkok berpotensi menjadi pendorong bagi ekspor Indonesia, ditengah turunnya harga komoditas dan melemahnya ekonomi mitra dagang Indonesia selama ini. Perkembangan indikator ekonomi Indonesia seperti indikator konsumsi dan indikator investasi menunjukkan pertumbuhan, meskipun terdapat beberapa indikator yang menunjukkan perlambatan.

Meski demikian, Indonesia perlu waspada terhadap kondisi perekonomian global dengan semakin besarnya ketidakpastian. Dari sisi pengeluaran 2023, konsumsi LNPR (Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga) diproyeksi tumbuh karena adanya pelaksanaan pemilu. Dari sisi lapangan usaha, sektor transportasi diperkirakan kembali meningkat sejalan dengan berakhirnya pandemi, sementara sektor pertanian diproyeksikan melambat karena

pengaruh perubahan iklim. Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,7 – 5,5%, (BPS, diolah).

Gambar 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tw I – Tw IV Tahun 2021 - 2023



Sumber: BPS, 2023

Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan pada triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan tetap kuat pada batas atas kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor. Pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat didukung oleh seluruh komponen PDB. Ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 11,68% (yoy), ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Konsumsi rumah tangga membaik dengan tumbuh sebesar 4,54% (yoy), seiring dengan naiknya mobilitas dan peningkatan daya beli serta penurunan inflasi. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif sebesar 3,99% (yoy) terutama

didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. Pertumbuhan investasi non bangunan tetap baik sejalan dengan kinerja ekspor, meski pertumbuhan investasi secara keseluruhan masih tertahan pada 2,11% (yoy) akibat investasi bangunan yang masih terbatas. Ekonomi Indonesia triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 tumbuh sebesar 5,03% (y-on-y), (BPS, 2023).

Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,93%. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,68%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat juga tecermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Secara Lapangan Usaha (LU), seluruh LU pada triwulan I 2023 mencatat pertumbuhan positif, terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Pertambangan dan Penggalian. LU Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Lainnya mencatat pertumbuhan yang tinggi, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan mancanegara, serta penyelenggaraan acara nasional dan internasional. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2023 tetap terjaga di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Kalimantan, diikuti Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Jawa, Sumatera, dan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), (BPS, 2023).

Gambar 1.2
Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau, Triwulan I-2023(%)



Sumber: BPS, 2023

Provinsi-provinsi di Pulau Jawa pada triwulan I-2023 mencatat dominasi struktur ekonomi Indonesia secara spasial dengan peranan sebesar 57,17% terhadap PDB, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,82%, Pulau Kalimantan sebesar 9,00%, Pulau Sulawesi sebesar 6,87%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,68%, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,46%. Sementara itu dengan dihapusnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022, pertumbuhan ekonomi di sebagian besar provinsi menunjukkan penguatan. Pada triwulan I-2023, penguatan pertumbuhan (y-on-y) tercatat pada kelompok provinsi di Pulau Sulawesi sebesar 7,00%, disusul Pulau Kalimantan sebesar 5,79%, Pulau Sumatera sebesar 4,79%, serta Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 4,74%. Kelompok provinsi di Pulau Jawa serta Pulau Maluku dan Papua mengalami perlambatan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,96% dan 1,95%, (BPS, 2023).

Tabel 1.1
PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Triliun Rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan		
		Triw I 2022	Triw IV 2022	Triw I 2023	Triw I 2022	Triw IV 2022	Triw I 2023
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	14,77	17,43	16,06	9,35	10,71	9,66
B.	Pertambangan dan Penggalian	4,43	5,44	4,76	2,63	2,74	2,46
C.	Industri pengolahan	2,29	2,94	2,51	1,43	1,70	1,49
D.	Pengadaan listrik dan gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
E.	Pengadaan air	0,02	0,03	0,02	0,01	0,02	0,01
F.	Konstruksi	4,16	5,78	4,77	3,04	3,99	3,28
G.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor	6,57	8,12	8,44	5,18	5,69	5,74
H.	Transportasi dan perdagangan	2,56	3,30	3,42	2,25	2,28	2,34
I.	Penyedia akomodasi dan makan minum	0,79	0,96	0,95	0,47	0,54	0,53
J.	Informasi dan komunikasi	1,46	1,62	1,64	1,47	1,61	1,53
K.	Jasa keuangan	0,99	0,96	0,99	0,60	0,54	0,56
L.	Real estate	1,94	2,02	2,07	1,42	1,45	1,48
M.	Jasa perusahaan	0,31	0,36	0,34	0,22	0,24	0,23
N.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	3,94	4,99	4,29	2,56	3,26	2,78
O.	Jasa pendidikan	1,43	1,54	1,47	0,95	1,02	0,97
P.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,69	1,72	1,66	1,26	1,26	1,20
Q.	Jasa lainnya	0,72	0,74	0,79	0,54	0,56	0,57
Produk Domestik Regional Bruto (DENGAN MIGAS)		48,13	57,58	54,25	33,45	37,66	35,0 0
Produk Domestik Regional Bruto (TANPA MIGAS)		45,03	54,96	51,90	31,81	36,13	33,6 7

Sumber: BPS Prov. Aceh, 2023

Sejalan dengan nasional, pertumbuhan ekonomi Sumatera pada triwulan I-2023 dibandingkan triwulan I-2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan mencapai 4,79%. Berdasarkan wilayah regional Sumatera, semua wilayah mengalami pertumbuhan positif. Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 6,51%, diikuti oleh Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 5,11% dan Provinsi Jambi sebesar 5,00%. Provinsi yang mengalami pertumbuhan paling rendah berturut-turut adalah Provinsi Riau yaitu mencapai 3,88% dan Provinsi Bengkulu sebesar 4,07%, (BPS, 2023).

Sementara itu, Provinsi Aceh sendiri mengalami pertumbuhan sebesar 4,63%. Kinerja perekonomian Provinsi Aceh pada triwulan I 2023 tumbuh kuat sebesar 4,63% year on year (yoy), meski melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat 5,60% (yoy). Pertumbuhan dari sisi sektoral didorong oleh Lapangan Usaha (LU) Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (sumber pertumbuhan 1,66%), serta LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (sumber pertumbuhan 0,92%), (BPS, 2023).

Dari sisi penggunaan, pertumbuhan didorong oleh Konsumsi Rumah Tangga (sumber pertumbuhan 1,77%), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (sumber pertumbuhan 1,49%), dan Ekspor Luar Negeri (sumber pertumbuhan 1,04%). Secara nominal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Aceh pada triwulan I 2023 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tercatat sebesar 54,25 triliun Rupiah, sedangkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

sebesar 35,00 triliun Rupiah. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh pada triwulan I 2023 terutama ditopang oleh kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tercatat tumbuh 10,72% (yoy), terakselerasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh 5,13% (yoy). Perekonomian Aceh triwulan I-2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 54,25 triliun Rupiah dengan migas dan tanpa migas adalah sebesar 51,90 triliun Rupiah. Sementara itu PDRB atas harga konstan dengan migas adalah sebesar 35,00 triliun Rupiah dan tanpa migas adalah sebesar 33,67 triliun Rupiah, (BPS Prov. Aceh, 2023).

Sementara LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mempunyai pangsa 15,56% dari total PDRB Provinsi Aceh. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan telah dicabutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di penghujung tahun 2022 dan meningkatnya mobilitas masyarakat dengan membaiknya pandemi Covid-19. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tercatat tumbuh 3,30% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh 11,40% (yoy). LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mempunyai pangsa 29,61% dari total PDRB Provinsi Aceh. Perlambatan disebabkan adanya pergeseran periode panen raya padi ke bulan April – Mei 2023, (BPS Prov. Aceh, 2023).

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian tercatat tumbuh negatif sebesar -6,26% (yoy), lebih dalam dari triwulan

sebelumnya yang juga tumbuh negatif -1,03% (yoy). Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan mempunyai pangsa sebesar 8,77% dari total PDRB Provinsi Aceh. Penurunan kinerja sektor ini sejalan dengan lifting minyak dan gas yang secara umum mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, pada sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 3,14% (yoy), terakselerasi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh negatif sebesar -0,60% (yoy). Konsumsi rumah tangga memiliki pangsa paling besar di sisi pengeluaran sebesar 54,98%. Kinerja konsumsi rumah tangga yang kuat didorong oleh nilai tukar petani (NTP) yang mencapai 113,07 pada triwulan laporan. Optimisme masyarakat yang meningkat sejalan dengan peningkatan UMP tahun 2023 juga turut mendukung peningkatan konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2023, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan I 2023 yang tercatat sebesar 113,7, meningkat dari 112,2 pada triwulan sebelumnya, (BPS Prov. Aceh, 2023).

PDRB merupakan informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu daerah wilayah tertentu (provinsi/kabupaten/kota). Dengan bantuan data PDRB, maka dapat ditentukannya sektor unggulan (*leading sector*) di suatudaerah/wilayah. Sektor unggulan adalah satu grup sektor/sub sektor yang mampu mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan di suatu daerah terutama melalui produksi, ekspor dan penciptaan lapangan kerja, sehingga identifikasi sektor unggulan sangat penting terutama dalam rangka

menentukan prioritas dan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Keterkaitan spasial pertumbuhan ekonomi pada umumnya menggambarkan hubungan perekonomian antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya dengan lingkungan sekitarnya. Keterkaitan ini dapat terjadi dikarenakan dipengaruhi oleh beberapa aspek yaitu, keterbatasan yang dimiliki suatu daerah atau wilayah menjadikan penghalang bagi pemenuhan kebutuhan wilayah akan memungkinkan terjadinya kerjasama bidang ekonomi, dan juga tumbuhnya kesadaran untuk membentuk kerjasama antar wilayah supaya bisa membangun kekuatan ekonomi regional, (Kusumastanto, 2018).

Ketimpangan antar daerah ini perlu ditanggulangi melalui kebijakan pembangunan oleh pemerintah daerah. Pengembangan wilayah sangat berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja ekonomi suatu wilayah (*intra regional economics*) dan keseimbangan perkembangan ekonomi antar wilayah (*inter-regional economics*), karena hakikatnya pembangunan nasional termasuk pengembangan wilayah yang dalam prosesnya adalah bagaimana memacu pertumbuhan wilayah dan menyebar secara merata, sehingga dapat menyejahterakan masyarakat yang ada didalamnya. Perkembangan hasil-hasil pembangunan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor SDA (sumber daya alam yang dimiliki suatu daerah), perbedaan keunggulan demografis, kinerja perekonomian suatu daerah atau wilayah (spasial) juga akan mempengaruhi perkembangan suatu daerah. Wilayah yang berkenaan dengan dimensi spasial (*space*) dari kegiatan pembangunan didasari

pemikiran bahwa suatu kegiatan ekonomi terdistribusi dalam ruang yang tidak homogen. lokasi mempunyai potensi dan nilai relatif terhadap lokasi lainnya, maka kegiatan yang bertujuan ekonomi akan tersebar sesuai dengan potensi dan nilai relatif lokasi yang mendukungnya, (Muta'ali, 2013).

Masalah ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan merupakan suatu masalah pokok yang selalu dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang. Apabila pemerintah tidak secara aktif melakukan campur tangan dalam kegiatan ekonomi, maka kegiatan perekonomian akan diatur oleh mekanisme pasar dan kemudian memberikan dampak negatif bagi pembangunan selanjutnya yaitu melebarnya jurang kesejahteraan dari masa ke masa antara daerah kaya dengan daerah miskin sebagai akibat dari kegiatan ekonomi daerah kaya lebih lancar dibandingkan dengan daerah miskin, (Hutabarat, 2015).

Untuk dapat memperkecil ketimpangan pendapatan antara masyarakat, maka investasi harus lebih banyak diarahkan kepada proyek-proyek yang ada hubungannya dengan masyarakat miskin, seperti pendidikan, kesehatan, kegiatan pertanian dan sebagainya sehingga ketimpangan yang terjadi tidak semakin melebar. Keberhasilan pembangunan dengan laju pertumbuhan ekonomi melebihi laju pertumbuhan penduduk, belum merupakan suatu tolak ukur terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu merata atau tidaknya tingkat kemiskinan. Tetapi keberhasilan pembangunan dengan laju pertumbuhan yang tinggi hanya melambangkan tolak ukur kemajuan

ekonomi secara kuantitatif saja, (Sagir, 2020). Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan antar daerah atau golongan masyarakat adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari selama masih ada perbedaan kemampuan dan faktor-faktor yang berpengaruh tersebut. Sehingga yang menjadi perhatian disini adalah usaha untuk mengurangi ketimpangan semaksimal mungkin melalui pengelolaan faktor-faktor dan sumber daerah secara optimal. Dengan demikian akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik disertai dengan pemerataan pendapatan yang baik pula.

Sektor unggulan adalah yang berkaitan dengan suatu perbandingan, baik itu perbandingan berskala regional, nasional maupun internasional. Pada lingkup internasional, Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (*technological progress*). Suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik, (Tambunan, 2021).

Ada beberapa jenis metode analisis untuk menentukan sektor-sektor ekonomi unggulan dengan pendekatan matematis dapat digunakan di suatu wilayah, di antaranya adalah Koefisien Lokasi (*Location Quotient*), *Typologi Klassen* dan analisis *Shift Share*. Penelitian ini menggunakan metode analisis *Location Quotient* dan *Shift Share* karena dengan dua alat analisis ini, akan semakin cepat

menemukan potensi sektor unggulan di daerah yang ingin dikaji (Nur, 2021). Analisis *Location Quotient* dan *Shift Share* bukanlah alat analisis baru, penelitian yang dilakukan oleh Nur (2021) untuk mengetahui sektor unggulan dan tidak unggul melalui data PDRB Kabupaten Bulungan, dengan menggunakan alat analisis *Shift Share*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yakni penelitian ini menggunakan dua alat analisis yaitu analisis *Shift Share* dan *Location Quotient*. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irham (2020) yang bertujuan untuk menentukan sektor unggulan pada Kabupaten Bireuen yang dihitung dari PDRB Kabupaten Bireuen dan Provinsi Aceh tahun 2005-2011 dengan menggunakan analisis model pertumbuhan rasio (mrp), *Shift Share* dan *typologi klassen*. Untuk mencari sektor unggulan tidak hanya dilakukan melalui analisis *Location Quotient*, tetapi juga perlu dilakukan analisis *shift share* untuk mengetahui perubahan struktur ekonomi Kabupaten Bireuen pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Tarigan (2014), metode *Location Quotient* (LQ) merupakan suatu perbandingan antara peran sektor ekonomi di suatu daerah terhadap besarnya peran sektor ekonomi yang sama secara nasional atau daerah yang memiliki cakupan administratif yang lebih besar. Berdasarkan analisis tersebut dapat diidentifikasi sektor-sektor apa saja yang dapat dikembangkan untuk tujuan mensupplay kebutuhan lokal, sehingga sektor yang dikatakan potensial dapat dijadikan sektor prioritas utama dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Arsyad (2007), menjelaskan bahwa teknik *Location Quotient* (LQ)

dapat membagi kegiatan ekonomi suatu daerah menjadi dua golongan yaitu: (1) kegiatan sektor ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun diluar daerah yang bersangkutan. Sektor seperti ini dinamakan sektor ekonomi potensial (basis), (2) kegiatan sektor ekonomi yang hanya melayani pasar di daerah tersebut dinamakan sektor tidak potensial (non-basis).

Sjafrizal (2008) Metode *Typologi klassen* merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing- masing suatu wilayah. *Typologi klassen* pada dasarnya membagi wilayah berdasarkan dua indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita. Analisis ini digunakan untuk penentuan sektor basis yang akan terjadi pada masa yang akan datang pada sektor potensial (Suyanto, 2000). Analisis *Shift Share* bertujuan untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkan dengan daerah yang lebih besar. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *Location Quotient* (LQ) dan metode *shift share* (SS).

Dalam hukum Tobler I, dijelaskan bahwa keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada hakikatnya tidak dapat dikatakan sebagai keberhasilan daerah itu sendiri. Melainkan banyak dipengaruhi oleh perkembangan daerah sekitarnya terutama dengan adanya pemasukan produksi dari wilayah di sekitar wilayah tersebut. Daerah yang berdekatan secara otomatis akan memiliki keterkaitan dan interaksi yang lebih kuat dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan daerah

yang posisinya berdekatan. Hubungan sosial ekonomi antar wilayah dalam berbagai bentuk aktivitas sosial ekonomi seperti melalui perdagangan industri, tenaga kerja dan modal, sehingga dapat menimbulkan hubungan antar wilayah. dengan perkembangan infrastruktur serta teknologi informasi yang semakin maju sehingga dapat memudahkan kita dalam melakukan suatu kegiatan ekonomi dan juga memudahkan kita dalam melakukan berbagai transaksi ekonomi antar wilayah, sehingga barang dan jasa akan lebih cepat masuk ke dalam suatu daerah tertentu tanpa harus menunggu dengan jangka waktu yang lebih lama. Begitu juga dengan hal nya transfer pendapatan, modal, teknologi, dan migrasi tenaga kerja, hal tersebut dapat mempermudah dalam merekrut tenaga kerja tidak hanya tenaga kerja yang berasal dari dalam wilayah setempat tetapi juga bisa berasal dari wilayah sekitarnya, (Nurlina, 2017).

Pengembangan ekonomi daerah tidak dapat dilakukan serentak pada semua sektor perekonomian, akan tetapi diprioritaskan pada pengembangan sektor-sektor yang potensi berkembangnya cukup besar. Penentuan sektor prioritas menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah, dimana daerah memiliki kesempatan serta kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Teori basis ekonomi (*economy base theory*) mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh besarnya ekspor dari daerah tersebut. Sektor basis adalah sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai

manfaat yang besar. Spesialisasi dalam perekonomian merupakan hal penting dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jika suatu daerah memiliki spesialisasi pada sektor tertentu maka daerah tersebut akan memiliki keunggulan kompetitif dari spesialisasi sektor tersebut, (Halidun, 2019).

Sektor basis ekonomi suatu wilayah dapat dianalisis dengan teknik *Location Quotient*, untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor basis atau bagaimana kemampuan sektor dalam memenuhi kebutuhan lokal atau keluar wilayah. Sektor yang masuk dalam kategori basis saja tidak cukup untuk menentukan keunggulan dari sektor tersebut. Sektor unggulan adalah sektor yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar. Sektor unggulan juga memberi nilai tambah dan produksi yang besar, memiliki *multiplier effect* yang yang besar terhadap perekonomian lain, serta memiliki permintaan yang tinggi di pasar lokal maupun pasar ekspor, (Sofyan, 2021).

Kajian terhadap lokasi merupakan alternatif dalam melihat perkembangan ekonomi suatu daerah, pola persebaran kegiatan ekonomi akan terbentuk suatu keunggulan pada masing-masing daerah dengan tumbuh cepat, sedang, lambat. Maka dari itu hal tersebut merupakan suatu keunggulan yang dimiliki suatu daerah untuk berkembang pada sektor-sektor tertentu dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya (*comparative advantage*). Tujuan akhir dalam pembangunan suatu daerah adalah kesejahteraan dengan menciptakan keterkaitan antar wilayah. Peningkatan pendapatan

regional yang disebabkan tumbuhnya sektor-sektor ekonomi unggulan pada suatu daerah. Keterkaitan antar daerah ini secara tidak langsung akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor unggulan di suatu daerah hingga dapat tercapainya dari tujuan pembangunan yang adil dan merata, (Muammilin Sun'an, 2015).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka perlu dilakukan studi mengenai sektor unggulan kabupaten/kota di provinsi Aceh dan keterkaitan spasial ekonomi antar kabupaten/kota berdasarkan sektor unggulannya tersebut. Sehingga keterkaitan spasial tersebut dapat menjadi dasar pembentukan kerjasama antar kabupaten/kota yang lebih optimal dalam mengembangkan potensi, daya saing, dan pemerataan pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan kabupaten/kota yang ada di provinsi Aceh dan mengidentifikasi keterkaitan spasialnya, maka dari itu peneliti meneliti dengan judul **“Analisis Sektor Unggulan Dan Keterkaitan Spasial Ekonomi Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk membatasi dan menentukan rumusan masalah, agar menghasilkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam dan terperinci. Berdasarkan latar belakang dan penjelasan diatas, maka didapatkan rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Aceh?

2. Berapa besar keterkaitan sektor unggulan secara spasial ekonomi di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibuat, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui berapa besar keterkaitan sektor unggulan secara spasial ekonomi di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang dengan analisis sektor unggulan di daerah serta dapat digunakan sebagai bahan tambahan.
2. Hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait sektor unggulan ke depannya.
3. Hasil penelitian dapat memberi pemahaman bagi masyarakat untuk mengambil kesempatan ikut dalam perekonomian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sektor Unggulan

Sektor unggulan adalah kelebihan yang melekat pada suatu komoditi yang dihasilkan melebihi dan memiliki kualitas tersendiri yang ada pada suatu Negara atau wilayah tertentu dibandingkan dengan komoditi serupa yang dimiliki oleh wilayah lain. Sektor ekonomi unggulan sebagai sektor ekonomi yang unggul atau mempunyai daya saing dalam beberapa periode tahun terakhir dan kemungkinan prospek sektor ekonomi dimasa yang akan datang. Dalam hal ini, sektor ekonomi unggulan lebih ditekankan pada aspek ekonomi semata, alangkah baiknya jika diperhatikan pula dampak yang akan timbul dari pengembangan sektor ekonomi yang dianggap unggul tersebut baik terhadap persoalan sosial maupun lingkungan, (Widodo, 2006).

Sektor unggulan adalah sektor yang keberadaannya telah berperan besar kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah, (Usya, 2006). Perencanaan pembangunan pada era otonomi daerah akan lebih berhasil jika ia dilakukan dengan memprioritaskan potensi dan sektor yang menjadi unggulan daerah, (Sutiyo, 2017). Menurut Sambodo dalam Usya (2006), bahwa sektor unggulan memiliki empat kriteria di antaranya: pertama sektor unggulan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kedua sektor unggulan memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar, ketiga sektor unggulan memiliki keterkaitan antara sektor yang

tinggi baik ke depan maupun ke belakang, dan keempat sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi. Ambardi (2002), menyatakan bahwa sektor unggulan daerah memiliki beberapa kriteria, di antaranya mampu menjadi penggerak utama (*prime mover*) pembangunan perekonomian, mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang (*forward and backward linkages*), mampu bersaing dan tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal.

Terdapat empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor unggulan, yaitu:

- 1) sektor unggulan memiliki laju pertumbuhan yang tinggi
- 2) sektor unggulan memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar
- 3) sektor unggulan memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik kedepan maupun kebelakang
- 4) sektor unggulan harus mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi (Rachibi, 2001).

Dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang dapat dikembangkan untuk mendukung kontribusinya terhadap pendapatan daerah, dapat dilakukan melalui pendekatan yang menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDRB meningkat di suatu wilayah dilihat dari laju pertumbuhan dan kontribusi sektor.
2. Kesejahteraan penduduk meningkat, hal ini berpengaruh pada perkembangan sektor.
3. Memiliki potensi pasar yang prospektif, baik pasar lokal, regional maupun pasar internasional.

4. Efisiensi investasi, yaitu dengan investasi yang kecil dapat menghasilkan output yang sebesar-besarnya.
5. Memiliki skala ekonomi yang besar sehingga potensial untuk dikembangkan.
6. Mempunyai kontribusi yang besar terhadap kegiatan ekonomi pada wilayah tersebut.
7. Menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar.
8. Memiliki dampak spasial yang besar dalam mendorong pengembangan wilayah, baik dalam lingkup provinsi maupun nasional (Mulyanto, 1999).

Terdapat sembilan sektor yang menopang struktur perekonomian provinsi Aceh, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan/konstruksi, sektor perdagangan, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perbankan serta sektor jasa- jasa. Sektor pertanian selalu memberikan sumbangan yang paling besar terhadap PDRB di Provinsi Aceh dalam setiap tahunnya. Terdapat empat sektor usaha yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh, yaitu pertanian, pariwisata, pertambangan, dan industri pengolahan. Keempat sektor usaha ini akan mendorong ekonomi Aceh pada tahun 2023, sehingga ekonomi akan tumbuh lebih berkualitas. Sektor pertanian merupakan sektor prioritas yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mengurangi risiko penahanan kinerja pada lapangan usaha tersebut.

2.2 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi terdiri dari dua kata yaitu pembangunan dan ekonomi. Menurut KBBI, pembangunan adalah hasil pekerjaan membangun, sedangkan ekonomi adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan pengolahan barang industri, pertanian dan perdagangan. Pembangunan ekonomi memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi bukan hanya memperhatikan nilai PDRB nya saja, namun juga mencakup peranan kelembagaan dan segala bentuk perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Pembangunan ekonomi juga menyangkut masalah kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu indikasi keberhasilan kinerja dari pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah senantiasa berhati-hati dalam menentukan arah kebijakan yang akan dilaksanakan bagi daerahnya. Ekonomi regional merupakan industri dengan beranekaragam potensi ekonomi pada beberapa sektor yang mempengaruhi keseluruhan pertumbuhan ekonomi, (Janaranjana Herath, 2011).

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat menyeluruh, seimbang dan berkelanjutan yang mengakibatkan perubahan besar, baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi ketimpangan daerah serta menghapuskan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi, (Sirojuzilam, 2008). Tujuan dari pembangunan ekonomi ada dua tahap. Tahap pertama, pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan, apabila tujuan ini sudah terealisasikan,

maka tahap kedua adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, (Sirojuzilam, 2010).

Pembangunan ekonomi daerah adalah sebuah proses pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh kerjasama antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru untuk merangsang berkembangnya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat mengelola sumberdaya yang ada dengan maksimal, orientasi ini mengarah kepada pengambilan kebijakan yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk mengembangkan kegiatan perekonomian di wilayah tersebut (Arsyad, 2010). Pada dasarnya, inti dari teori-teori tersebut berkisar antara dua hal, yaitu pembahasan tentang metode yang menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita riil penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan begitu, diharapkan pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerahnya secara lebih optimal. Salah satu cara pengembangan perekonomian daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah bisa dilakukan dengan pengembangan sektor-sektor unggulan yang dimiliki, (Sjafrizal, 2014). Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan kinerja pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di setiap negara. Setiap

Negara di dunia sangat memperhatikan laju pertumbuhan ekonominya. Termasuk Indonesia yang saat ini menjalankan kebijakan otonomi daerahnya, pemerintah senantiasa memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap tahunnya. Kebijakan otonomi daerah yang dijalankan Indonesia saat ini memberikan kesempatan besar bagi seluruh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adanya otonomi daerah diharapkan bagi seluruh daerah untuk dapat berdiri sendiri dalam menjalankan kebijakan yang telah diambil. Dengan kata lain, otonomi daerah bertujuan untuk membentuk kemandirian atau mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat Indonesia. Namun, dalam menjalankan otonomi daerah tersebut, hal utama yang menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah daerah adalah mengidentifikasi dan pemahaman atas potensi yang dimiliki oleh daerah yang diembannya. Daerah yang telah mengetahui dengan benar potensi yang dimiliki daerahnya, maka akan dapat memanfaatkan potensi tersebut demi keberlangsungan perekonomian daerahnya. Berbeda halnya dengan daerah yang tidak mengetahui dengan benar potensi yang dimiliki, maka pemerintah daerah tidak dapat secara optimal dalam memanfaatkan yang menjadi potensi di daerahnya, (Erawati, 2011).

Teori pertumbuhan ekonomi wilayah menganalisis suatu wilayah sebagai suatu sistem ekonomi terbuka yang berhubungan dengan wilayahwilayah lain melalui arus perpindahan faktor-faktor

produksi dan pertukaran komoditas. Pembangunan dalam suatu wilayah akan mempengaruhi pertumbuhan wilayah lain dalam bentuk permintaan sektor untuk wilayah yang akan mendorong pembangunan wilayah tersebut atau suatu pembangunan ekonomi dan wilayah lain akan mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di suatu wilayah serta interelasi. Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai sebagai dampak kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dan berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi dan sebagai indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan (Sirojuzilam, 2008).

Majunya perekonomian suatu daerah diukur menggunakan pertumbuhan ekonominya atau perkembangan jumlah PDRB, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat meningkat setiap periodenya. Diperlukan pengembangan sektor sektor unggulan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun semakin tingginya rata-rata pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan menimbulkan masalah lain berupa ketidak merataan pendapatan. Ketimpangan pendapatan antar kabupaten atau daerah disebabkan karena adanya perbedaan potensi sumber daya manusia, infrastruktur dan potensi sumber daya alamnya. Ketimpangan yang tinggi dapat membawa dampak yang buruk terhadap kestabilan ekonomi. Upaya untuk mengatasi ketimpangan pendapatan dengan mendorong perekonomian Provinsi Aceh melalui pengembangan sektor-sektor unggulan, dan diharapkan mampu berpindah ke zona daerah prima

untuk kedepannya, (Adisasmita, 2008).

2.2.1 Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Tahap pertama perencanaan bagi setiap lembaga yang terkait dalam pembangunan ekonomi daerah adalah menentukan peran yang nantinya akan dilakukan dalam proses pembangunan. Ada 4 peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu sebagai:

- a. *Enterprenuer*, dengan perannya sebagai *entrepreneur*, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dalam lembaga BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dapat mengembangkan usahanya sendiri. Semua aset pemerintahan daerah harus dapat dikelola dengan lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan.
- b. Koordinator, sebagai koordinator pemerintah daerah dapat bertindak untuk menetapkan kebijakan, untuk mengusulkan strategi-strategi pembangunan di daerahnya. Perluasan dari peranan ini dalam pembangunan ekonomi dapat melibatkan kelompok-kelompok di masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian informasi ekonomi, seperti kesempatan kerja, angkatan kerja dan pengangguran. Dalam peranannya sebagai koordinator, pemerintah daerah juga dapat melibatkan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, dunia usaha serta masyarakat dalam penyusunan strategi-strategi. Pendekatan ini sangat potensial dalam menjaga konsistensi pembangunan daerah dengan nasional dan

menjamin bahwa perekonomian daerah akan mendapatkan manfaat yang maksimum.

- c. Fasilitator, dengan fungsi fasilitator Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan mengenai perilaku atau budaya masyarakat di daerahnya, maka akan mempercepat proses pembangunan dan produser perencanaan serta pengaturan penetapan daerah yang lebih baik.
- d. Stimulator, pemerintah daerah dapat memberikan stimulan penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan yang akan masuk ke daerah tersebut dan menjaga perusahaan-perusahaan yang telah ada supaya tetap berada dan beroperasi di daerah tersebut. Hal ini bias dilakukan dengan cara pembangunan kawasan industri serta membantu industri kecil melakukan pameran.

2.2.2 Peran Swasta dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Sektor swasta memiliki peran penting dalam pembangunan.

Beberapa peran swasta dalam pembangunan, yaitu:

- a. *Development agent* (agen pembangunan)

Dalam hal ini, sektor swasta diharapkan terlibat dalam pembangunan di berbagai sektor yang bergerak di semua sektor, namun tidak termasuk sektor yang hanya dikuasai oleh sektor publik yang menyangkut kepentingan masyarakat umum.

- b. *Prime mover of development* (penggerak utama dari

pembangunan)

Pihak swasta diharapkan mampu menggerakkan pembangunan melalui penyediaan lapangan kerja. Pihak swasta dapat membantu program pengurangan pengangguran dengan cara menciptakan lapangan kerja baru, selain yang ditawarkan oleh institusi pemerintahan.

- c. *Innovator and technological advancement* (inovasi bisnis dan pengembangan teknologi)

Diharapkan sektor swasta mampu mendorong berkembangnya inovasi bisnis dan pengembangan teknologi melalui kreativitas. Inovasi dan teknologi tersebut kemudian diharapkan dapat mendorong pembangunan dengan menciptakan output produk yang lebih efektif dan efisien.

- d. *Partner*

Sektor publik dalam menyediakan jasa dan layanan kepada masyarakat. Diharapkan sektor swasta juga dapat memberikan jasa layanan kepada masyarakat disamping pelayanan yang sudah disediakan pemerintah (Beiq dkk, 2016).

2.2.3 Teori Sektor (*Sector Theory of Growth*) Pemberian Alam

Setiap wilayah mengalami perkembangan meliputi siklus jangka pendek dan jangka panjang. Dalam analisis jangka pendek pada umumnya digunakan faktor-faktor penduduk, tenaga kerja, upah, harga, teknologi dan distribusi penduduk, sedangkan laju pertumbuhan jangka panjang diukur menurut keluaran atau output dan pendapatan. Pada dasarnya pertumbuhan dapat terjadi sebagai

akibat dari faktor-faktor penentu yang terdapat di dalam daerah yang bersangkutan dan faktor-faktor diluar wilayah atau kombinasi.

Diantara kedua faktor tersebut, Teori sektor adalah teori pertumbuhan yang paling sederhana. Teori ini dikembangkan berdasarkan hipotesis *Clark-Fisher* yang mengemukakan bahwa kenaikan pendapatan perkapita akan diikuti oleh penurunan dalam proporsi sumber daya yang digunakan dalam sektor pertanian yang menjadi sektor primer dan kenaikan dalam sektor industri manufaktur dalam hal ini sektor sekunder, kemudian dalam industri jasa yang termasuk kedalam sektor tersier. Laju pertumbuhan yang mengalami perubahan (sektor *shift*) dianggap sebagai determinan utama dari perkembangan suatu daerah. Penyebab Perubahan atau pergeseran yang terjadi pada sektor terkait dapat dilihat dari sisi permintaan dan sisi penawaran.

Pada sisi permintaan, elastisitas pendapatan dari permintaan untuk barang dan jasa yang di supply oleh industri manufaktur atau industri jasa lebih tinggi dibandingkan untuk produk-produk primer. Pendapatan yang meningkat akan diikuti oleh perpindahan sumber daya dari sektor primer ke sektor sekunder dan sektor jasa. Dari sisi penawaran, yaitu realokasi sumber daya tenaga kerja dan modal dilakukan sebagai akibat dari perbedaan tingkat pertumbuhan produktivitas dalam sektor-sektor sekunder dan tersier menikmati kemajuan yang lebih besar dalam tingkat produktivitas. Hal ini dapat mendorong peningkatan pendapatan dan produktivitas yang lebih cepat, karena produktivitas yang lebih tinggi dapat memungkinkan untuk melakukan realokasi sumber daya.

Tingkat pertumbuhan produktivitas tergantung pada inovasi dan kemajuan tehnik ataupun skala ekonomi. Jika produktivitas lebih tinggi dalam industriindustri, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat cepat, maka terdapat kausalitas “produktivitas-harga rendahpermintaan bertambah luas”, bukan sebaliknya. Terjadinya perubahan dan pergeseran sektor serta evaluasi spealisasi atau pembagian kerja dipandang sebagai sumber dinamika pertumbuhan wilayah. Suatu perluasan dari teori sektor ini adalah teori tahapan yang menjelaskan bahwa perkembangan wilayah merupakan proses evolusioner internal dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Tahapan perekonomian sub sistem swasembada dimana hanya terdapat sedikit investasi dan perdagangan. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian.
- b. Untuk mendorong perdagangan dan spesialisasi maka harus ada kemajuan transportasi di daerah yang bersangkutan. Industri pedesaan masih relatif sederhana atau tradisional untuk memenuhi kebutuhan kerja para petani.
- c. Jika bertambah majunya perdagangan antar wilayah, maka wilayah yang maju akan memprioritaskan pada pengembangan sub sektor tanaman pangan, lalu diikuti oleh sub sektor-sektor peternakan dan perikanan.
- d. Harus ada perkembangan di industri sekunder, pada permulaan pengolahan produk-produk primer, kemudian diperluas dan semakin berspesialisasi.
- e. Pengembangan industri tersier yang melayani permintaan

dalam wilayah maupun diluar wilayah.

2.2.4 Faktor-faktor yang yang membuat daerah memiliki sektor unggulan

Karena kondisi alam akhirnya wilayah itu memiliki keunggulan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Pemberian alam antara lain deposit bahan tambang (minyak, gas, emas, biji besi, timah, dan lainnya); kondisi tanah yang khas; serta potensi alam; serta potensi alam. Peranan Sumber Daya Alam yang menjadi sektor unggulan dalam Pembangunan. Dalam pembangunan melalui pengembangan wilayah mempunyai arti penting dalam proses pemerataan pembangunan yang meliputi peningkatan pendapatan, peningkatan gross output baik langsung, tidak langsung maupun terinduksi, serta peningkatan keterkaitan lintas sektoral dan lintas regional.

a. Akumulasi Modal

Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat diproduksi. Pembentukan modal merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi.

b. Kemajuan Teknologi

Pertumbuhan teknologi dianggap sebagai faktor yang paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan didalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan-pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru.

c. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membagi kearah ekonomi produksi skala besar yang selanjutnya membentuk perkembangan ekonomi. Sehingga dalam pembagian kerja akan memakan waktu yang relatif cepat untuk melakukan produksi. Maka seorang perencana wilayah harus memiliki kemampuan untuk menganalisis potensi ekonomi wilayahnya. Hal ini terkait dengan kewajibannya di satu sisi menentukan sektor riil yang perlu dikembangkan agar perekonomian suatu daerah tumbuh cepat dan disisi lain mampu mengidentifikasi factor-faktor yang membuat potensi sector tertentu rendah dan menentukan apakah prioritas untuk menanggulangi kelemahan tersebut. Setelah otonomi daerah, masing-masing daerah sudah lebih bebas dalam menentukan sektor/komoditi yang diprioritaskan dalam pembangunannya. Kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan/kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk di kembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang daerah tersebut, (Tarigan Robinson, 2007).

2.3 Teori Sektor Unggulan Dalam Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

2.3.1 Analisa Location Quotient (LQ)

Location quotient (LQ) merupakan perbandingan besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut secara nasional. *Location Quotient* (LQ) adalah suatu

perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut secara nasional.

Menggunakan LQ sebagai penunjuk adanya keunggulan komparatif dapat digunakan sebagai sektor-sektor yang telah lama berkembang. Menggunakan LQ sebagai penunjuk adanya keunggulan komparatif dapat digunakan sebagai sektor-sektor yang telah lama berkembang, (Muammil Sun'an, 2015).

Analisis LQ dalam kajian ini digunakan untuk mencari sektor unggulan di Provinsi Aceh. Adapun rumus LQ tersebut adalah :

$$LQ = \frac{PDRB_{IH} / \sum PDRB_{IH}}{PDRB / \sum PDRB}$$

Keterangan :

LQ = Besarnya koefisien lokasi suatu sektor ekonomi

$PDRB_{IH}$ = Sektor / di Provinsi Aceh tahun tertentu

$\sum PDRB_{IH}$ = Total PDRB Provinsi Aceh tahun tertentu

PDRB = Sektor I di Provinsi Aceh tahun tertentu

$\sum PDRB$ = Total PDRB di Provinsi Aceh tahun tertentu

2.3.2 Analisa Shift Share

Shift share merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktural ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Tujuan analisa ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar

(regional atau nasional).

Analisis *Shift share* adalah metode untuk menganalisis pertumbuhan regional. Melalui analisis ini, alasan pertumbuhan dan potensi pertumbuhan lebih lanjut di masa depan dapat ditentukan. Analisis pangsa perubahan membagi pertumbuhan regional menjadi tiga komponen. Pertama, komponen potensi (partisipasi) menjelaskan perbandingan pertumbuhan daerah dengan pertumbuhan nasional atau menunjukkan mengikuti pertumbuhan nasional. Oleh karena itu, pertumbuhan daerah ditangani dengan cara yang sama seperti pertumbuhan nasional. Kedua, komponen campuran menjelaskan kecepatan relatif pertumbuhan regional dan pertumbuhan nasional. Ketiga, komponen kompetitif menjelaskan keunggulan kompetitif relatif suatu industri tertentu di suatu wilayah dibandingkan dengan industri di suatu negara. Sebuah departemen dengan keunggulan kompetitif berarti memiliki lingkungan yang kondusif untuk pengembangan departemen terkait, (Nugroho, 2003).

Analisis *shift-share* juga membandingkan perubahan laju pertumbuhan berbagai sektor (industri) di daerah kita dengan wilayah nasional. Akan tetapi, metode ini lebih tajam dibandingkan dengan metode LQ metode LQ tidak memberikan penjelasan atas faktor penyebab perubahan, sedangkan metode *shift-share* memperinci penyebab perubahan atas beberapa variabel. Analisis ini menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya.

Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian

dalam 3 bidang yang berhubungan satu sama lain yaitu:

- a. Ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang di jadikan acuan.
- b. Pergeseran proporsional (*proportional shift*) mengukur perubahan relatif, pertumbuhan atau penurunan, pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang diacukan.
- c. Diferensial (*differential shift*) membantu kita dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (local) dengan perekonomian yang dijadikan acuan. Oleh karena itu, jika pergeseran diferensial dari suatu sektor adalah positif, maka sektor tersebut lebih tinggi daya saingnya ketimbang yang terjadi pada sektor yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan pada daerah tertentu, (Arsyad, 2016).

2.3.3 Analisis Menurut Klassen Typology

Typologi klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertical dan rata-rata pendapatan perkapita. Sebagai sumbu horizontal. Daerah yang diamati akan dibagi menjadi empat klasifikasi yaitu daerah cepat

maju dan cepat tumbuh, daerah maju tapi tertekan, daerah berkembang cepat dan daerah relatif tertinggal. Analisis *typologi klassen* digunakan dengan tujuan mengidentifikasi posisi sektor perekonomian daerah dengan memperhatikan sektor perekonomian nasional. Analisis *Typologi klassen* ini bersifat dinamis karena sangat bergantung pada perkembangan kegiatan Pembangunan, (Sjafrizal, 2014).

Metode yang digunakan untuk mengetahui pengelompokan sektor ekonomi dalam wilayah Provinsi Aceh menurut struktur pertumbuhannya yaitu *Typologi Klassen*. Dengan menggunakan *Matrix Klassen* dapat dilakukan empat pengelompokan sektor dengan memanfaatkan laju pertumbuhan dan nilai kontribusi sektor PDRB Provinsi Aceh dan Indonesia. Dapat dilihat bahwa yang menjadi sektor unggulan di Provinsi Aceh dimana merupakan sektor yang maju dan tumbuh dengan cepat yaitu : (1) pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Sedangkan sektor yang mempunyai potensi untuk menentukan Prioritas pembangunan di Provinsi Aceh, yaitu : (1) Sektor *Real Estate*, (2) pertambangan dan penggalian, (3) pengadaan listrik dan gas, (4) pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, (5) perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, (6) transportasi dan pergudangan, (7) penyediaan akomodasi dan makan minum, (8) jasa pendidikan, (9) jasa kesehatan dan kegiatan sosial, (BPS Prov. Aceh, 2023).

a. Pengertian Spasial

Interaksi spasial merupakan hubungan yang terjadi karena adanya interaksi tergantung pada nilai observasi tetangganya, yaitu wilayah j dimana $i \neq j$. Interaksi yang terjadi antar wilayah dapat berupa di bidang ekonomi contohnya adalah aliran barang dan jasa, migrasi tenaga kerja, aliran pendapatan masuk transfer dan pengiriman uang. Interaksi juga dapat terjadi di bidang teknologi yaitu, terjadinya difusi teknologi dari wilayah yang memiliki teknologi lebih tinggi ke wilayah yang memiliki teknologi lebih rendah. Selain itu, situasi politik di suatu wilayah akan mempengaruhi kebijakan di wilayah tersebut yang akan berdampak ke wilayah tetangganya (Romzi, 2011).

Besarnya keterkaitan antar wilayah dapat berbeda-beda tergantung dari intensitas dan kualitas interaksinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah letak suatu wilayah dengan wilayah lain (tetangga). Semakin dekat letak suatu wilayah terhadap wilayah lain, memungkinkan tingkat interaksi yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah yang letaknya lebih jauh. Hal ini sesuai dengan hukum Tobler I bahwa segala sesuatu berkaitan satu sama lain, namun sesuatu yang dekat memiliki keterkaitan yang lebih erat dibandingkan yang jauh. Hukum geografi “Tobler” yang pertama menyebutkan bahwa “setiap hal memiliki keterkaitan dengan hal lainnya, namun yang lebih berdekatan memiliki keterkaitan lebih dari yang lainnya”. Aspek spasial adalah fenomena yang alami. Sangat wajar apabila perkembangan suatu wilayah lebih dipengaruhi oleh wilayah disebelahnya atau lebih dekat dibandingkan wilayah

lainnya yang lebih berjauhan akibat adanya interaksi sosial-ekonomi antar penduduk (Rustiadi, 2011:17).

Hubungan interaksi spasial tersebut contohnya seperti yang dikemukakan oleh (Rondinelli dalam, Gulo 2015), dalam sistem kewilayahan, interaksi antara pusat pertumbuhan dan wilayah belakang atau *hinterland* nya terdapat hubungan dan ketergantungan yang saling membutuhkan. Keterkaitan dalam hubungan ekonomi antara wilayah sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan wilayah lain sebagai *hinterland* nya adalah sebagai sentral penyalur bahan pokok, pusat pemasaran dari hasil-hasil produksi, pusat pendidikan, penyerap tenaga kerja, sentra perdagangan pusat pengembangan perkebunan dan pertanian, pusat pangkalan perikanan, dan pusat perhubungan laut dan udara.

Hubungan saling mempengaruhi dan ketergantungan antar komponen nantinya akan membentuk suatu hubungan timbal balik antar komponen tersebut. Adanya hubungan timbal balik nantinya akan memberikan dampak diantara keduanya baik berupa dampak negatif maupun dampak positif. Bila dibaratkan komponen tersebut berupa wilayah, maka dampak negatif yang dihasilkan dari interaksi kedua wilayah yaitu berupa permasalahan seperti permasalahan adanya pergerakan penduduk dari wilayah kurang maju ke wilayah lebih maju. Sedangkan dampak positif dari hubungan timbal balik tersebut berupa penjualan hasil industri dari wilayah satu ke wilayah yang lainnya (Kasikoen, 2011).

Kajian pengembangan wilayah sangat berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja ekonomi suatu wilayah (*intra-regional*

economics) dan keseimbangan perkembangan ekonomi antar wilayah (*inter-regional economics*), karena pada hakikatnya pembangunan nasional termasuk pengembangan wilayah yang dalam prosesnya adalah bagaimana memacu pertumbuhan wilayah dan menyebarkan secara merata, sehingga dapat mensejahterahkan masyarakat yang ada didalamnya. Perkembangan wilayah berkenaan dengan dimensi spasial (*space*) dari kegiatan pembangunan didasari pemikiran bahwa kegiatan ekonomi terdistribusi dalam ruang yang tidak *homogen*. Oleh karena lokasi mempunyai potensi dan nilai relatif terhadap lokasi lainnya, maka kegiatan yang bertujuan ekonomi maupun sosial akan tersebar sesuai dengan potensi dan nilai relatif lokasi yang mendukungnya, (Muta'ali, 2013).

Kajian terhadap lokasi merupakan alternatif dalam melihat perkembangan ekonomi suatu wilayah, pola persebaran kegiatan ekonomi akan terbentuk suatu keunggulan pada masing-masing wilayah dengan tumbuh cepat, sedang dan tumbuh lambat (baca: terbentuk tipologi wilayah). Hal ini merupakan suatu keunggulan yang dimiliki suatu wilayah untuk berkembang pada sektor-sektor tertentu dibandingkan dengan wilayah lainnya (*comparative advantage*).

Sektor-sektor ini dapat mendasari bagaimana pola distribusi perkembangan ekonomi wilayah dan menunjukkan kemanfaatannya terhadap daerah sekitarnya yang belum berkembang. Konteks geografi dengan pendekatan kompleks wilayah (*Geography Analysis*) dan spasial menjadi bagian analisis untuk melihat perkembangan suatu wilayah dan selanjutnya akan dijadikan sebagai

analisis pertumbuhan dalam konteks regional approach. Sehingga muncul analisis baru dalam konteks geografi ekonomi yang menjelaskan bahwa dalam konteks ilmu bumi ekonomi (*economic geography*) pola terjadinya adalah dengan adanya aktivitas ekonomi yang dapat menunjukkan keberadaan suatu kegiatan di suatu lokasi dan bagaimana wilayah sekitarnya beraksi atas kegiatan tersebut dan gejala-gejala dari suatu kegiatan yang bersangkutan paut dengan tempat atau lokasi sehingga ditemukan prinsip-prinsip penggunaan ruang yang berlaku umum. Selanjutnya, Pendekatan keruangan menjadi salah satu faktor kajian dalam konteks pendekatan geografi dengan berdasarkan faktor tertentu, misalnya faktor perbedaaan lokasi, (Muta'ali, 2013).

Kajian yang fokus pada aspek spasial/ruang penting dalam menunjang berbagai macam elemen perencanaan fisik maupun pada struktur yang sangat kompleks suatu wilayah, sehingga dapat memberi gambaran mengenai kegiatan didalamnya serta melihat bentuk dan pola ruang yang dapat dijadikan sebagai alternatif perencanaan, misalnya dalam perencanaan tata ruang wilayah. Masalah lain yang sering muncul dalam proses perencanaan dan pembangunan wilayah yang dilihat dari aspek ekonomi adalah aspek kesenjangan antara wilayah yang satu dengan yang lainnya. Pendekatan keruangan menjadi aspek penting penelitian ini dengan mengkaji dan menganalisis karakter perkembangan ekonomi wilayah, terutama dalam ruang kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Selain itu faktor-faktor geografis dapat mempengaruhi distribusi keruangan atau spasial dari perkembangan ekonomi wilayah,

sehingga secara spasial dapat dilakukan analisis lebih mendalam yang disertai dengan perbandingan antara faktor-faktor ekonomi wilayah yang menjadi basis dalam kegiatan perekonomian wilayah.

b. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya penelitian untuk mengetahui laju pertumbuhan dan pembangunan suatu wilayah telah banyak studi yang melakukannya. Dengan berbagai alat ukur dan juga teori yang telah menyatakan tentang pertumbuhan ekonomi yang melibatkan sektor unggulan untuk mencapai tujuan dari pembangunan wilayah itu sendiri. Dengan adanya perbandingan sektor- sektor dengan wilayah lain untuk menentukan sektor unggulan. Beberapa pendekatan ini menentukan keberadaan suatu sektor unggulan terhadap peningkatan pendapatan suatu daerah dan efek yang di timbulkannya pendapatan suatu daerah. Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan materi pembahasan yaitu diantaranya:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Metode Penelitian
1.	Yanti Heryanti dkk (2014)	Interaksi Spasial Perekonomian dan Ketenagakerjaan antar Kabupaten/ Kota Provinsi Jambi	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelompokan pola hubungan yang terbentuk akibat adanya interaksi spasial terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dalam periode tahun 2008-2012 tidak mengalami perubahan.	Metode Kuantitatif, <i>Global Moran's I (Global Spatial Autocorrelation)</i>
2.	Suhada (2018)	Peranan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Indragiri hulu	Sektor unggulan pada Kabupaten Indragiri Hulu adalah sektor pertambangan dan penggalian, dimana nilai LQ sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2013 sebesar 2,12 dan besarnya kontribusi sektor pertambangan	Metode Kuantitatif, <i>Location Quotient</i>

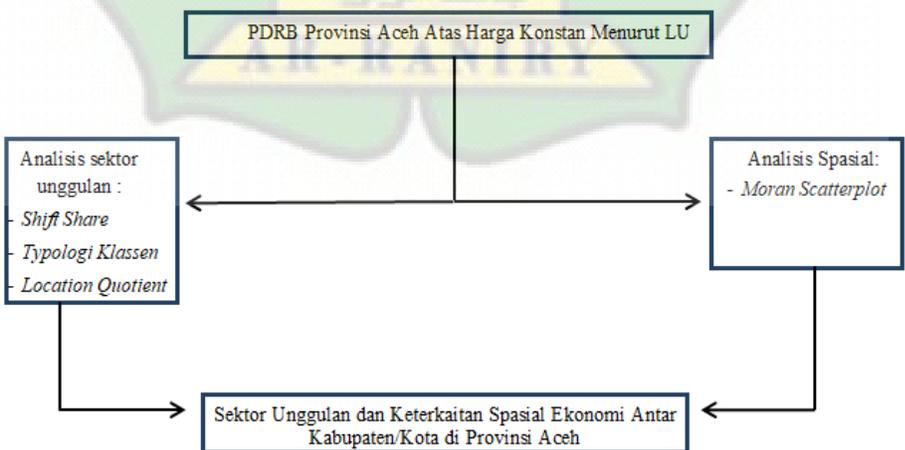
			dan penggalian yaitu sebesar 17,12%. Nilai LQ pada Sektor Pertambangan dan Penggalian tahun 2014 yaitu sebesar 2,12 Pada dan sektor pertambangan dan penggalian dan kontribusi yaitu sebesar 10,64%.	
3.	Nurti Khasanah (2016)	Peranan Sektor Unggulan Dalam Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi	Sektor unggulan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitupertanian dimana ikut berkontribusi sebesar 50% pada kurun waktu priode tahun 2010-2014.Sektor perekonomian daerah yang menunjukan bahwa hasil perhitungan LQ diseluruh sector perekonomian berdasarkan indicator pendapatan daerah yaitu PDRB atas dasar harga konstan 2010 terdapat dua sector yang menjadi basis perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi yang dapat diprioritaskan menjadi sektor unggulan pada tahun 2010-2014 yaitu pertumbuhan sektor pertanian sebesar 2,071%.	Metode Kuantitatif, <i>Location Quotient</i>
4.	Muammar (2021)	Analisis sector unggulan dikota Banda Aceh berdasarkan metodologi Klassen dan Shift Share	Secara ekonomi, PDRB per kapita kota Banda Aceh menempati urutan pertama di Aceh, dan pendapatan per kapita untuk produk non makanan telah melebihi 50%, dan tingkat kesejahteraan sosial lebih tinggi dan maju. PDRB kota Banda Aceh pada tahun 2020 terjadi penurunan, alasan penurunan tersebut adalah dampak dari pandemi covid-19 yang menghambat aktivitas ekonomi di Sebagian sector komersial.	Metode Kuantitatif, <i>Typologi Klassen, Shift Share, dan Overlay</i>
5.	Marisa Saputri (2022)	Analisis sector unggulan di Kabupaten Bireun	Struktur perekonomian kabupaten Bireuen didominasi oleh 5 kategori lapangan usaha di antaranya: pertanian, kehutanan dan perikanan; perdagangan besar dan eceran,	Metode Kuantitatif, <i>Location Quotient, Shift Share</i>

			<p>reparasi mobil, dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; konstruksi; serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB kabupaten Bireuen pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Selanjutnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor. Sedangkan tiga kategori lainnya memberikan kontribusi yang hampir sama. Kabupaten Bireuen terdiri dari 17 kecamatan yang memiliki potensi daerah yang berbeda-beda yang dapat menghasilkan suatu output ekonomi.</p>	
6.	Dylla Novrillas ari (2008)	<p>Analisis Sektor Unggulan dalam Meningkatkan Perekonomian dan Pembangunan Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi</p>	<p>- Diketahui bahwa prioritas di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. - Diketahui bahwa Kecamatan Kuantan Tengah memegang peringkat pertama dalam ketersediaan fasilitas Pembangunan.</p>	<p>Metode Kuantitatif, <i>Location Quotient</i></p>
7.	Zulfi Haris (2012)	<p>Analisis Penentuan sektor/subsector or Unggulan dan Kaitanya Dengan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Lampung Utara</p>	<p>- Terdapat 7 subsektor unggulan yaitu sub sektor kehutanan, subsektor listrik, subsector perdagangan, subsector angkutan jalan raya, subsector subsecto makanan dan minuman, subsector perkebunan, subsector perbankan. - Enam sub sektor sudah masuk RPJMD Lampung. Utara tahun 2010-2014 dan 1 subsektor unggulan lainnya tidak masuk RPJMD.</p>	<p>Metode Kuantitatif, <i>Location Quotient</i></p>

8.	Astri Irawati (2015)	Analisis Spasial Perkembangan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Sukoharjo	Hasil dari kedua analisis kriteria cepat tumbuh, Kabupaten yaitu : Sektor Industri terdapat di Kecamatan Kartasura, Grogol, dan Sukoharjo. Sektor Listrik gas air bersih terdapat di Kecamatan Sukoharjo. Sektor bangunan terdapat di Kecamatan Grogol. Sektor perdagangan hotel restoran terdapat di Kecamatan Bendosari, Nguter, Bulu dan Weru. Sektor pengangkutan komunikasi terdapat di Kecamatan Gatak, Mojolaban, Polokarto, Nguter, dan Tawang Sari. Sektor keuangan jasa perusahaan terdapat di Kecamatan Gatak, Baki, Bendosari, dan Bulu. Sektor jasa-jasa terdapat di Kecamatan Gatak, Baki, Mojolaban, Polokarto, Tawang Sari, Weru, Nguter.	Metode Kuantitatif, <i>Location Quotient</i> , <i>Shift Share</i> , <i>Geographic Information System</i>
----	----------------------	--	---	--

C. Kerangka Berpikir

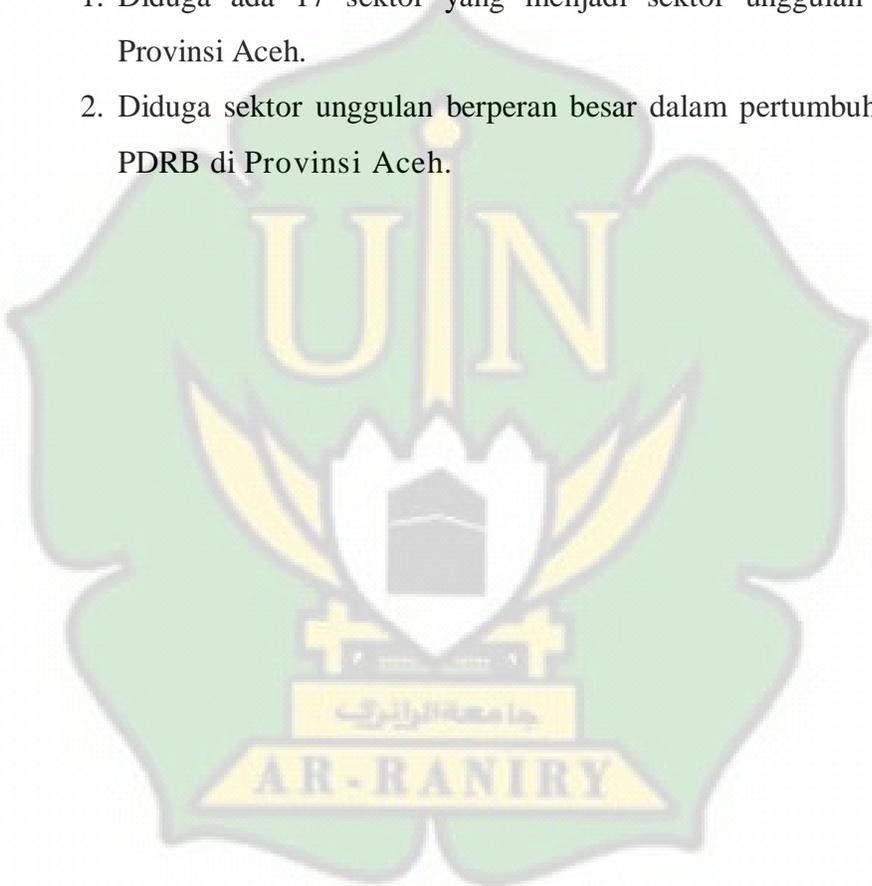
Mengacu pada teori dan hasil penemuan terdahulu, maka kerangka berpikir penelitian adalah seperti gambar dibawah ini:



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang diuraikan dari konsep yang telah dikemukakan dapat ditarik suatu hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga ada 17 sektor yang menjadi sektor unggulan di Provinsi Aceh.
2. Diduga sektor unggulan berperan besar dalam pertumbuhan PDRB di Provinsi Aceh.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk penelitian yang populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dengan alat analisis yaitu analisis *shift share* dan analisis *location quotient*. Analisis ini bertujuan untuk melihat sektor unggulan serta untuk melihat perubahan struktur perekonomian daerah. Peneliti mengambil data-data yang dikumpulkan untuk dianalisis dan diidentifikasi sektor-sektor perekonomian yang menjadi sektor basis dan menjadi penggerak perekonomian menggunakan pendekatan kuantitatif, yang berupa data Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Aceh.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang tidak memberikan data langsung kepada pengumpul data. Data sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dan dapat menunjang penelitian ini (Sugiyono, 2017). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi beberapa penelitian terdahulu, jurnal, internet, dan beberapa data yang akan di ambil dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional adalah suatu informasi mengenai cara mengukur variabel yang diteliti serta memberikan informasi untuk peneliti lain dengan variabel yang sama.

3.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah atas nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor produksi dalam wilayah tertentu serta dalam waktu tertentu pula, baik yang dibeli oleh konsumen dalam wilayah tersebut maupun oleh konsumen dari wilayah lain. Metode dalam melakukan perhitungan PDRB terdapat dua macam yaitu berdasarkan harga berlaku dan berdasarkan harga konstan. Perhitungan berdasarkan harga berlaku merupakan nilai tambah yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku saat itu. Perhitungan kedua adalah berdasarkan harga konstan atau nilai tambah yang dihitung berdasarkan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasarnya.

Produk Domestik Regional Bruto adalah penambahan nilai bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi di wilayah domestik di suatu negara, tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki tersebut residen atau tidak residen, yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dengan tujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Penyajian PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha, (BPS, 2023).

Menurut Tarigan (2004) dalam perhitungan PDRB dapat menggunakan tiga pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di suatu daerah kemudian dikurangi dengan biaya antara masing-masing total produksi padasetiap kegiatan subsektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu atau dalam jangka waktu satu tahun. Unit-unit produksi dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi sembilan sektor atau lapangan usaha yaitu; pertanian, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa.

b. Pendekatan Pengeluaran

Berdasarkan pendekatan pengeluaran Produk Domestik Bruto dihitung dengan menjumlahkan semua komponen permintaan

akhir. Komponen-komponen tersebut antara lain pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor netto.

c. Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan Produk Domestik Regional Bruto merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa yang dimaksud meliputi upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan, semua perhitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya.

3.3.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses sebuah kegiatan perekonomian yang mengakibatkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah, sehingga akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Indikator yang digunakan dalam mengukur laju pertumbuhan ekonomi daerah adalah tingkat penambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa melihat tingkat pertumbuhan penduduk dan ada perubahan atau tidak dalam pergeseran struktur ekonomi, (Sukirno, 2015).

3.3.3 Sektor-Sektor Ekonomi

Sektor ekonomi adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan ekonomi kedalam beberapa kelompok tertentu. Kegiatan ekonomi

yang beragam menyebabkan struktur perekonomian yang beragam pula tergantung bagaimana peran atau kontribusi dari setiap sektor ekonomi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, terdapat 17 sektor-sektor ekonomi yang diteliti, diantaranya:

1. Pertanian kehutanan dan perikanan
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Pengadaan listrik dan gas
5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
8. Transportasi dan pergudangan
9. Penyediaan akomodasi makan dan minum
10. Informasi dan komunikasi
11. Jasa dan keuangan asuransi
12. Real estate
13. Jasa perusahaan
14. Administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
17. Jasa lainnya

3.4 Model Analisis Data

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data secara kuantitatif, yaitu alat analisis yang digunakan dalam studi penelitian ini secara umum menggunakan metode analisis *location quotient* (LQ) yaitu untuk mengetahui sektor unggulan yang ada di Provinsi Aceh. Untuk melihat perubahan dan pergeseran sektor perekonomian di Provinsi Aceh dianalisis menggunakan teknik *shift share* (SS).

3.4.1 Moran Scatterplot

Salah satu metode statistik yang umum digunakan untuk mencari autokorelasi spasial adalah statistik Indeks Moran, yaitu ukuran dari korelasi antara pengamatan yang saling berdekatan. Statistik ini membandingkan nilai pengamatan di suatu daerah dengan nilai pengamatan daerah lain. Menurut Lee dan Wong (2001) Indeks Moran dapat diukur dengan persamaan:

$$I = \frac{n \sum_i \sum_j W_{i,j} (X_i - \bar{X})(X_j - \bar{X})}{(\sum_i \sum_j W_{i,j}) \sum (X_i - \bar{X})^2}$$

Dimana:

n = Banyaknya pengamatan

\bar{X} = Nilai rata-rata dari (X_i) dari n lokasi

X_j = Nilai pada lokasi ke- j

X_i = Nilai pada lokasi ke- i

W_{ij} = Elemen matriks pembobot spasial

Pembobot W_{ij} yang merupakan berat spasial matrik

mempunyai aturan bernilai 1 apabila letak antara lokasi I dan lokasi j saling berdekatan, sedangkan bernilai 0 apabila letak antara lokasi I dan j saling berjauhan. Pembobotan Wij dapat ditampilkan dalam matrik kedekatan (*contiguity matrices*) yang sesuai dengan hubungan spasial antar lokasi yang menggambarkan hubungan antar daerah. Nilai koefisien Moran berkisar antara -1 sampai +1. Autokorelasi akan bernilai negatif apabila tidak memiliki autokorelasi atau 0 sampai -1, sedangkan autokorelasi akan terjadi atau bernilai positif apabila nilainya antara 0 sampai +1. Nilai Moran yang negatif dan positif memiliki asosiasi secara spasial dengan wilayah sekelilingnya.

Moran scatterplot adalah alat yang digunakan untuk melihat hubungan antara nilai pengamatan yang terstandarisasi dengan nilai rata-rata tetangga yang sudah terstandarisasi. Pemetaan dengan menggunakan Moran scatterplot akan menyajikan empat kuadran yang menggambarkan empat tipe hubungan suatu wilayah dengan wilayah-wilayah lain disekitarnya sebagai tetangga (Anselin, 2010).

Kuadran II <i>(Low-High)</i>	Kuadran I <i>HH (High-High)</i>
Kuadran III <i>(Low-Low)</i>	Kuadran IV <i>HL (High-Low)</i>

Menurut Zhukov (2010), kuadran-kuadran dalam *Moran Scatterplot* adalah sebagai berikut:

1. Pada kuadran I, HH (*High-High*) menunjukkan bahwa daerah yang mempunyai nilai pengamatan tinggi dikelilingi oleh

daerah yang mempunyai nilai pengamatan tinggi.

2. Pada kuadran II, LH (*Low-High*) menunjukkan bahwa daerah yang mempunyai nilai pengamatan rendah dikelilingi oleh daerah yang mempunyai nilai pengamatan tinggi.
3. Pada kuadran III, LL (*Low-low*) menunjukkan bahwa daerah yang mempunyai nilai pengamatan rendah dikelilingi oleh daerah yang mempunyai nilai pengamatan rendah.
4. Pada kuadran IV, HL (*High-Low*) menunjukkan bahwa daerah yang mempunyai nilai pengamatan tinggi dikelilingi oleh daerah yang mempunyai nilai pengamatan rendah.

3.4.2 Analisis Location Quotient (LQ)

Salah satu indikator yang mampu menggambarkan keberadaan sektor basis adalah melalui indeks LQ (*location quotient*) yaitu suatu indikator sederhana yang dapat menunjukkan kekuatan atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan daerah di atasnya atau wilayah referensi. Interpretasi hasil analisis LQ adalah yaitu :

1. Apabila $LQ > 1$, maka menunjukkan sektor *i*/ komoditas tersebut merupakan sektor yang potensial/unggulan di kabupaten tersebut, artinya sektor tersebut mempunyai peran ekspor di wilayah tersebut.
2. Apabila $LQ < 1$, maka menunjukkan bahwa sektor *i*/ komoditas tersebut bukan merupakan sektor yang potensial di kabupaten tersebut, artinya sektor tersebut tidak mempunyai peran ekspor di wilayah tersebut justru akan mendatangkan

impor dari wilayah lain.

3. Apabila $LQ = 1$, maka peranan sektor tersebut di wilayah itu, yaitu setara atau sama dengan peranan sektor tersebut di wilayah lain yang memiliki nilai sama, (Muammil Sun'an, 2015).

3.4.3 Analisis Shift Share

Analisis *shift share* dapat digunakan untuk membandingkan perbedaan pertumbuhan sektoral antar wilayah administrasi yang lebih rendah dan wilayah administrasi yang lebih tinggi atau sering disebut tingkat nasional, (Tarigan, 2005).

Analisis *shift share* yang digunakan dalam penelitian ini suntuk mengetahui perbedaan pergeseran sektor pada perekonomian wilayah di Provinsi Aceh. Hasil analisis *shift share* akan menggambarkan kinerja sektor- sektor dalam PDRB Provinsi Aceh. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyimpangan yang terjadi sebagai hasil perbandingan tersebut. Apabila penyimpangan tersebut positif, maka dikatakan suatu sektor dalam PDRB Provinsi Aceh memiliki keunggulan kompetitif atau sebaliknya. Bentuk umum dari persamaan shift share sendiri adalah (Soepomo,1993):

$$Dij = Nij + Mij + Cij$$

Dimana:

$$Nij = Eij \cdot Rn$$

$$Mij = Eij (rin - rn)$$

$$Cij = Eij (rij - rin)$$

Dari persamaan sampai rij mewakili pertumbuhan

sektor/subsector i di wilayah j. Sedangkan r_n dan r_{in} masing-masing adalah laju pertumbuhan agregat nasional/provinsi dan pertumbuhan sektor/subsector i secara nasional yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$R_{ij} = \frac{E_{ij, t} - E_{ij}}{E_{ij}}$$

$$R_{in} = \frac{E_{in, t} - E_{in}}{E_{in}}$$

$$R_n = \frac{E_{ij} (R_{ij} - R_{in})}{E_n}$$

Dimana:

Dij : Perubahan PDB sektor/subsector i di wilayah j (Nasional) dalam kurun waktu tertentu.

Nij : Perubahan PDRB sektor/subsector i di wilayah j (Provinsi Aceh) yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh

Mij : Perubahan Bauran Industri sektor/subsector i diwilayah Provinsi Aceh yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan sektor i di Nasional

Cij : Perubahan PDRB sektor/subsector i di Provinsi Aceh yang disebabkan oleh keunggulan kompetitif sektor i tersebut di wilayah Nasional.

Eij : PDRB sektor/subsector I diwilayah j Provinsi Aceh tahun awal analisis

Ein : PDB sektor/subsector i wilayah referensi (Nasional) tahun

awal analisis.

En : Total PDB Nasional tahun awal analisis

Eij,t : PDRB Provinsi Aceh sektor i tahun akhir analisis

Ein,t : PDB sektor i di Nasional tahun akhir analisis

En,t : PDB total Nasional tahun akhir analisis.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Deskripsi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis dan Kependudukan

Provinsi Aceh terletak antara $01^{\circ} 58' 37,2''$ - $06^{\circ} 04' 33,6''$ Lintang Utara dan $94^{\circ} 57' 57,6''$ - $98^{\circ} 17' 13,2''$ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Provinsi Aceh adalah sebuah Daerah Istimewa yang terletak di Pulau Sumatra. Daerah Aceh yang terletak di bagian paling barat gugusan kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut-sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara.

Batas-batas wilayah Provinsi Aceh, sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan sebelah Barat dengan Samudera Hindia. Satu-satunya hubungan darat hanyalah dengan Provinsi Sumatera Utara, sehingga memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan Provinsi Sumatera Utara. Luas Provinsi Aceh 5.677.081 ha, dengan hutan sebagai lahan terluas yang mencapai 2.290.874 ha, diikuti lahan perkebunan rakyat seluas 800.553 ha. Sedangkan lahan industri mempunyai luas terkecil yaitu 3.928 ha.

Gambar 4.1 Peta Provinsi Aceh



Jumlah penduduk provinsi ini sekitar 5.096.248 jiwa, dengan luas wilayah 58.375,63 km². Secara administratif, Provinsi Aceh terbagi menjadi 18 Kabupaten, 5 Kota, 276 Kecamatan dan 6.455 kelurahan/desa dengan Banda Aceh sebagai ibukota provinsi.

Tabel 4.1
Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2017-2018

Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk	
	2017	2018
SIMEULUE	50	51
ACEH SINGKIL	64	65
ACEH SELATAN	56	56
ACEH TENGGARA	50	51
ACEH TIMUR	77	79
ACEH TENGAH	46	47
ACEH BARAT	73	75
ACEH BESAR	141	144
PIDIE	136	139
BIREUEN	252	257
ACEH UTARA	224	227
ACEH BARAT DAYA	77	79
GAYO LUES	16	17
ACEH TAMIANG	135	137
NAGAN RAYA	46	46

ACEH JAYA	23	23
BENER MERIAH	75	76
PIDIE JAYA	163	167
BANDA ACEH	4641	4.734
SABANG	279	283
LANGSA	845	859
LHOKSEUMAWE	1301	1.329
SUBULUSSALAM	67	68
ACEH	91	93

Sumber: BPS Provinsi Aceh

4.2 Wilayah Administrasi dan Ketenagakerjaan

Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh sehingga wilayah ini menjadi pusat pemerintahan. Secara Administrasi terdapat 23 Kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota Madya.. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Aceh selama 2 tahun terakhir mengalami penurunan, yaitu sebesar 17,92 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 16,77 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal ini masih terkait penghematan anggaran akibat Pandemi Covid-19. Pendapatan keuangan Pemerintah Provinsi Aceh sebagian besar berasal dari pos Pendapatan Transfer dengan kontribusi sebesar 63–64 persen per tahun yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat. Adapun Pendapatan Asli Daerah sebagai bentuk kemandirian keuangan daerah sangat kecil jumlahnya, hanya sekitar 14-15 persen. Akan tetapi, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Aceh tetap meningkat. Sepanjang tahun 2021-2022 pengeluaran Pemerintah Provinsi Aceh mencapai 13,98 hingga 16,77 triliun rupiah. Belanja Pemerintah Provinsi Aceh ini dialokasikan terbanyak kepada belanja operasi dengan kontribusi sebesar 56–62 persen. Realisasi Pendapatan Pemerintah kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh pada

tahun 2021 mencapai 29,68 triliun rupiah.

Pada tahun 2022, target pendapatan Pemerintah kabupaten/kota seluruh Provinsi Aceh menurun menjadi 28,63 triliun rupiah. Adapun total belanja daerah tingkat dua selama tahun 2021 mencapai 28,31 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2022 kabupaten/kota menargetkan belanja daerah sebesar 28,63 triliun rupiah. Pendapatan Pemerintah kabupaten/kota sebagian besar berasal dari Pendapatan Transfer, dengan kontribusi sebesar 84–86 persen per tahun. Pendapatan dari PAD sebagai bentuk kemandirian daerah sangat kecil jumlahnya (10 persen). Sedangkan belanja Pemerintah kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh dialokasikan terbanyak kepada belanja operasional dengan kontribusi sebesar 61-64 persen setiap tahunnya.

Tabel 4.2
Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Aceh

No.	Kabupaten/Kota	Ibukota	Kecamatan	Desa
1.	Kabupaten Aceh Barat	Meulaboh	12	321
2.	Kabupaten Aceh Barat Daya	Blang Pidie	9	132
3.	Kabupaten Aceh Besar	Jantho	23	592
4.	Kabupaten Aceh Jaya	Calang	6	172
5.	Kabupaten Aceh Selatan	Tapak Tuan	16	369
6.	Kabupaten Aceh Singkil	Singkil	10	127
7.	Kabupaten Aceh Tamiang	Karang Baru	12	128
8.	Kabupaten Aceh Tengah	Takengon	14	268
9.	Kabupaten Aceh Tenggara	Kutacane	11	164
10.	Kabupaten Aceh Timur	Idi Rayeuk	21	580
11.	Kabupaten Aceh Utara	Lhoksukon	27	1160
12.	Kabupaten Bener Meriah	Simpang Tiga Redelong	7	232
13.	Kabupaten Bireuen	Bireuen	17	514

14.	Kabupaten Gayo Lues	Blang Kejeren	11	97
15.	Kabupaten Simeulue	Sinabang	10	138
16.	Kabupaten Nagan Raya	Suka Makmue	10	222
17.	Kabupaten Pidie	Sigli	23	730
18.	Kabupaten Pidie Jaya	Meureudu	8	222
19.	Kota Banda Aceh	-	9	90
20.	Kota Sabang	-	3	18
21.	Kota Langsa	-	5	66
22.	Kota Lhokseumawe	-	4	68
23.	Kota Subulussalam	-	5	82

Sumber: BPS Provinsi Aceh

Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar akan mampu menjadi potensi pembangunan apabila dibina dengan baik. Pembinaan yang baik akan menghasilkan mutu angkatan kerja yang baik. Angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran. Padahal harapan pemerintah, semakin banyaknya jumlah angkatan kerja bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi. Hal ini bisa terjadi apabila kualitas angkatan kerja yang ada tidak memenuhi kualifikasi yang diharapkan dunia usaha. Tingkat pendidikan yang rendah akan menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang minim pula. Imbasnya adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja yang berpengaruh terhadap capaian kualitas hasil produksi barang dan jasa yang rendah.

4.2.1 Struktur Ekonomi Dan Produk Domestik Regional Bruto

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah

yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha akan menunjukkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Tabel 4.3
Peranan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2018-2022

No	Kategori Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,03	3,39	3,48	0,35	3,31
2.	Pertambangan dan Penggalian	6,66	5,86	8,22	-0,95	4,30
3.	Industri Pengolahan	8,26	-1,10	-4,43	2,53	4,19
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	7,55	6,88	2,78	-0,21	2,44
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,19	24,20	-2,87	2,54	9,83
6.	Konstruksi	2,74	5,16	10,61	-0,46	-2,36
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,05	3,01	-5,34	4,23	6,36
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,67	2,96	-28,44	19,51	7,24
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum	8,28	6,73	-7,63	-6,11	32,40
10.	Informasi dan Komunikasi	2,23	5,26	11,58	7,57	11,25
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,87	12,58	0,55	-5,08	5,93
12.	Real Estat	6,09	6,87	-1,19	4,06	3,98
13.	Jasa Perusahaan	6,61	5,83	-3,19	0,26	11,56
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,28	3,18	-3,31	6,38	0,06
15.	Jasa Pendidikan	7,94	8,65	3,47	1,23	3,83
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,79	7,52	4,48	9,71	9,81
17.	Jasa Lainnya	5,33	7,24	1,47	2,23	13,59
18.	Total PDRB	4,61	4,14	-0,37	2,79	4,21

Sumber: BPS Provinsi Aceh

Selama 3 tahun terakhir (2020-2022), struktur perekonomian Provinsi Aceh didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, yakni: Penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan

komunikasi, jasa perusahaan, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Provinsi Aceh.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi Aceh pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, yaitu mencapai 32,40%. Selanjutnya kategori jasa lainnya sebesar 13,59%, disusul oleh lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 11,56%, berikutnya lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 11,25% dan lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,81%. Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial adalah kategori lapangan usaha yang secara konstan mengalami peningkatan peranan. Sedangkan kategori jasa perusahaan peranannya berfluktuatif namun cenderung menurun.

Berdasarkan harga berlaku, nilai PDRB Provinsi Aceh pada tahun 2020 terjadi penurunan. Penurunan tersebut diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sehingga menghambat kegiatan ekonomi di sebahagian besar lapangan usaha. Perekonomian Aceh Triwulan I-2023 yang diukur berdasarkan nilai PDRB Provinsi Aceh atas dasar harga berlaku mencapai 54,25 triliun Rupiah (dengan Migas), dan non migas adalah sebesar 51,90 triliun Rupiah. Sementara itu, nilai PDRB Provinsi Aceh atas dasar harga konstan 2010 mencapai 35,00 triliun Rupiah (dengan Migas), dan non Migas adalah sebesar 33,67 triliun Rupiah.

4.3 Hasil Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang akan digunakan yaitu menggunakan analisis *Typologi Klassen*, *Shift Share*, dan *Location Quotient*. Dengan tujuan untuk menentukan sektor unggulan dan sektor yang memiliki daya saing. Selain itu juga sebagai perbandingan pertumbuhan antara satu sektor dengan sektor lainnya di Provinsi Aceh.

4.3.1 Hasil Analisis Typologi Klassen

Analisis *Typologi Klassen* digunakan untuk melihat bagaimana gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi serta menentukan sektor unggulan dengan melihat sektor-sektor yang masuk pada kuadran satu. Gambaran tentang pola struktur pertumbuhan ini, dapat dipergunakan untuk memsperkirakan prospek ekonomi daerah pada masa yang akan datang.

Berdasarkan tabel 4.3, kita dapat melihat pertumbuhan dan kontribusi rata-rata sektor-sektor ekonomi yang ada di Provinsi Aceh. Dimana sektor yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi paling besar dihasilkan oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, yaitu mencapai 32,40%. Selanjutnya disusul oleh sektor jasa lainnya sebesar 13,59%, dan sektor lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 11,56%.

Tabel 4.4

Hasil Pengolahan Data Analisis Typologi Klassen Sektor Unggulan Provinsi Aceh 2018-2022

Sektor Lapangan Usaha	Provinsi Aceh		Nasional	
	(S)	(Sk)	(Si)	(Ski)
Petanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,03	0,28	0,02	0,13
Pertambangan dan Penggalian	0,04	0,08	0,02	0,07
Industri Pengolahan	0,01	0,05	0,02	0,21
Listrik dan Gas	-0,34	0,00	0,03	0,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,00	0,05	0,00
Konstruksi	0,02	0,10	0,02	0,10
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,03	0,15	0,03	0,13
Transportasi dan Pergudangan	0,02	0,07	0,04	0,04
Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	0,12	0,01	0,03	0,03
Informasi dan Komunikasi	0,09	0,04	0,09	0,06
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,01	0,02	0,03	0,04
Real Estate	0,04	0,04	0,03	0,03
Jasa Perusahaan	0,05	0,01	0,04	0,02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,01	0,09	0,02	0,03
Jasa Pendidikan	0,04	0,03	0,02	0,03
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,08	0,03	0,08	0,01
Jasa Lainnya	0,08	0,01	0,05	0,02

Sumber: Data diolah, 2023

Keterangan:

S : Rata² Laju Pertumbuhan Sektor PDRB Provinsi Aceh

Sk : Rata² Kontribusi PDRB Provinsi Aceh

Si : Rata² Laju Pertumbuhan Sektor PDB Nasional

Ski : Rata² Kontribusi PDB Nasional

Tabel 4.5

Kesimpulan Hasil Analisis Typologi Klassen

<p style="text-align: center;">Kuadran I</p> <p style="text-align: center;"><i>Sektor maju dan tumbuh dengan pesat</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Pengadaan Air, Pengelolaan sampah limbah dan daur ulang 4. Kontruksi 5. Real Estat 	<p style="text-align: center;">Kuadran II</p> <p style="text-align: center;"><i>Sektor maju tapi tertekan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transportasi danPergudangan 2. Admistrasi Pemerintahan, Pertahanan dan JaminanSosial Wajib 3. jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
<p style="text-align: center;">Kuadran III</p> <p style="text-align: center;"><i>Sektor potensial atau masih dapat berkembang</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri Pengolahan 2. Pengadaan Listrik dan Gas 3. Perdagangan Besar dan Eceren; Reparasi Modil dan Sepeda Motor 4. Penyedian Akomodasi Makan-Minum 5. Informasi dan Komunikasi 6. Jasa Perusahaan 7. Jasa Pendidikan 8. Jasa Lainnya 	<p style="text-align: center;">Kuadran IV</p> <p style="text-align: center;"><i>Sektor relatif tertinggal</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Keuangan dan Asuransi

Sumber: Data diolah,2023

4.3.2 Hasil Analisis Shift Share

Analisis Shift Share adalah teknik untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor ekonomi di wilayah Provinsi Aceh selama kurun waktu 5 tahun. Analisis shift share digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi suatu wilayah (Provinsi

Aceh) terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih luas (Nasional). Dalam penelitian ini analisis shift share dilakukan dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari periode tahun 2018-2022.

Dengan menggunakan analisis *Shift-Share*, maka kita dapat berasumsi bahwasanya perubahan struktur ekonomi atau hasil kegiatan perekonomian suatu regional berhubungan positif dengan struktur atau kinerja suatu sektor ekonomi dengan wilayah di atasnya seperti Provinsi Aceh. Perubahan kinerja sektor ekonomi suatu daerah terhadap wilayah di atasnya akan dipengaruhi oleh beberapa komponen seperti pertumbuhan ekonomi Provinsi (N_{ij}), ekonomi Proposional (M_{ij}), dan keunggulan kompetitif (C_{ij}).

Tabel 4.6
Hasil Analisis *Shift-Share* Provinsi Aceh Dalam Milyaran Rupiah Tahun 2018-2022

Sektor Lapangan Usaha	2018-2022			
	N_{ij}	M_{ij}	C_{ij}	D_{ij}
Petanian, Kehutanan, dan Perikanan	4364778,68	-879757,66	106905,99	3591927
Pertambangan dan Penggalian	1127659,86	-419353,50	971129,64	1679436
Industri Pengolahan	789794,18	-195826,54	-531866,63	62101
Pengadaan Listrik dan Gas	24378,75	3965,28	-4017,04	24327
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5118,17	3807,05	5968,77	14894
Konstruksi	1472268,46	-598440,18	687714,72	1561543
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Modil dan Sepeda Motor	2430928,02	-238376,58	-595523,44	1597028

Transportasi dan Pergudangan	1180038,08	-46174,37	-1667789,70	-533926
Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	206116,03	-31559,91	204871,88	379428
Informasi dan Komunikasi	542267,15	1186550,82	77865,03	1806683
Jasa Keuangan dan Asuransi	256425,83	33988,30	-267958,13	22456
Real Estat	635338,80	42111,03	58263,17	735713
Jasa Perusahaan	101115,64	15666,95	2975,41	119758
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1415185,43	-620604,58	-98172,85	696408
Jasa Pendidikan	400193,18	-80745,32	270513,15	589961
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	457384,01	936824,02	-82532,03	1311676
Jasa Lainnya	216773,25	109401,93	137561,82	463737
Total PDRB	Rp. 15.625.765	Rp. -778.523	Rp. -724.090	Rp. 14.123.150

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil Analisis *Shift-Share*, Kinerja dari masing-masing sektor ekonomi dari tahun 2018-2022 bisa disimpulkan terjadi peningkatan, ini terlihat dari banyaknya nilai yang positif. Hampir semua sektor ekonomi yang ada di Provinsi Aceh yang memiliki nilai pertumbuhan riil positif, hanya sektor Transportasi dan Pergudangan yang memiliki nilai pertumbuhan negatif (-533926).

Hal ini sesuai juga dengan penelitian (Adyatama, 2018) yang menjelaskan bahwasanya, apabila nilai (Dij) menunjukkan nilai positif, maka terjadi peningkatan kinerja ekonomi dari sektor tersebut, serta sektor ini tergolong kedalam sektor yang memiliki daya saing yang tinggi. Sebaliknya, apabila nilai Dij-nya negatif maka sektor ini masuk kedalam sektor dengan kategori pertumbuhan

yang lambat. Berdasarkan nilai dan angka-angka yang tercantum dalam Tabel 4.46, maka dapat diberikan interpretasi sebagai berikut :

- 1) Nilai Total (Dij) sebesar 14.123.150 triliun Rupiah menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2018-2022 perekonomian Provinsi Aceh mengalami pertambahan nilai absolut atau mengalami kenaikan kinerja perekonomian daerah sebesar 14.123.150 triliun Rupiah Peningkatan ini disumbangkan oleh semua sektor ekonomi. Ada lima sektor ekonomi yang menjadi penyumbang terbesar yakni:
 - a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.591.927 Rupiah
 - b. Informasi dan Komunikasi 1.806.683 Rupiah
 - c. Pertambangan dan Penggalian 1.679.436 Rupiah
 - d. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1.597.028 Rupiah
 - e. Konstruksi 1.561.543 Rupiah
- 2) Nilai (Cij) Total sebesar -724.090 Rupiah menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2018-2022 setiap sektor perekonomian Provinsi Aceh secara agregat memiliki daya saing atau keunggulan kompetitif (*competitiveness*) yang cepat terhadap perekonomian Nasional. Perekonomian Provinsi Aceh mengalami peningkatan daya saing dengan Pertumbuhan nilai ekonomi sebesar -724.090 Rupiah. Terdapat 7 sektor yang mengalami penurunan daya saing negatif (-) terhadap sektor ekonomi yang sama pada perekonomian Nasional. 7 sektor tersebut adalah Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas,

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Keuangan dan Asuransi.

- 3) Pergeseran Proporsional (*Proportional Shift*) atau Mij totalnya sebesar -778.523 triliun Rupiah. Menunjukkan bahwa sepanjang kurun waktu tahun 2018-2022 perekonomian Provinsi Aceh secara agregat mengalami penurunan sebesar -778.523 triliun Rupiah. Hal ini mengandung makna bahwa kegiatan perekonomian Provinsi Aceh memiliki penurunan pertumbuhan sektoral yang cepat.
- 4) Pengaruh pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh (*National growth effect/ National Share*) terhadap perekonomian Nasional menunjukkan nilai yang positif terhadap semua sektor ekonomi dengan total nilai output yakni sebesar 14.123.150 triliun Rupiah. Berdasarkan nilai komponen Nij (*National Share*), maka sektor yang memiliki perkembangan paling cepat di Provinsi Aceh dibandingkan dengan perkembangan rata-rata Nasional adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Pertambangan dan Pengalihan, Pengadaan Air, Pengelolaan sampah limbah dan daur ulang, Sektor Konstruksi, dan Real Estate.

4.3.3 Hasil Analisis Location Quotient

Salah satu indikator yang mampu menggambarkan keberadaan sektor basis adalah melalui indeks LQ (*location quotient*) yaitu suatu indikator sederhana yang dapat menunjukkan kekuatan atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan daerah di atasnya atau wilayah referensi. Pendekatan *location quotient* (LQ) adalah salah satu pendekatan yang sering dilakukan dalam model ekonomi basis, sebagai langkah awal untuk mengetahui sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

Analisis LQ membandingkan besarnya peranan sebuah sektor pada tingkat Provinsi Aceh dengan besar peranan sektor yang sama pada tingkat pembanding yaitu Nasional. Besarnya nilai LQ merupakan sebuah indikator dasar untuk menentukan sektor potensial dalam suatu daerah dan peluang untuk mengembangkan sektor tersebut dimasa yang akan datang, karena yang menjadi sektor potensial tersebut akan mampu untuk memenuhi kebutuhan di daerah itu sendiri dan juga kebutuhan untuk daerah lainnya. Sektor ekonomi yang memiliki nilai koefisien $LQ > 1$, menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis di Provinsi Aceh. Artinya selain dapat memenuhi kebutuhan di Provinsi Aceh sendiri, juga memiliki potensi ekspor ke wilayah lain karena ada surplus pada sektor yang bersangkutan. Adapun sektor yang memiliki $LQ < 1$ menunjukkan bahwa sektor tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang besar kepada Provinsi Aceh.

Interpretasi hasil analisis LQ adalah yaitu :

1. Apabila $LQ > 1$, maka menunjukkan sektor i/ komoditas tersebut merupakan sektor yang potensial/unggulan di kabupaten tersebut, artinya sektor tersebut mempunyai peran ekspor di wilayah tersebut.
2. Apabila $LQ < 1$, maka menunjukkan bahwa sektor i/ komoditas tersebut bukan merupakan sektor yang potensial di kabupaten tersebut, artinya sektor tersebut tidak mempunyai peran sektor ekspor di wilayah tersebut justru akan mendatangkan impor dari wilayah lain.
3. Apabila $LQ = 1$, maka peranan sektor tersebut di wilayah itu, yaitu setara atau sama dengan peranan sektor tersebut di wilayah lain yang memiliki nilai sama, (Muammil Sun'an, 2015).

Tabel 4.7

Hasil Analisis Location Quotient

Kategori Lapangan Usaha	LQ 2018	LQ 2019	LQ 2020	LQ 2021	LQ 2022	Rata-rata	Keterangan
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2,23	2,24	2,24	2,21	2,26	2,24	Basis
B. Pertambangan & Penggalian	0,94	1,00	1,08	1,04	1,05	1,02	Basis
C. Industri Pengolahan	0,24	0,23	0,22	0,22	0,22	0,23	Non Basis
D. Pengadaan Listrik, Gas	0,15	0,16	0,16	0,16	0,02	0,13	Non Basis
E. Pengadaan Air	0,41	0,48	0,43	0,43	0,46	0,44	Non Basis
F. Konstruksi	0,94	0,94	1,06	1,03	1,00	1,0	Basis
G. Perdagangan Besar & Eceran, & Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1,18	1,17	1,13	1,14	1,16	1,15	Basis
H. Transportasi &	1,81	1,77	1,46	1,71	1,54	1,66	Basis

Pergudangan							
I. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0,44	0,44	0,45	0,41	0,49	0,45	Non Basis
J. Informasi & Komunikasi	0,67	0,65	0,65	0,66	0,69	0,66	Non Basis
K. Jasa Keuangan	0,41	0,44	0,42	0,40	0,37	0,41	Non Basis
L. Real Estate	1,41	1,44	1,37	1,40	1,44	1,41	Basis
M,N Jasa Perusahaan	0,36	0,35	0,35	0,35	0,36	0,35	Non Basis
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & JSW	2,70	2,69	2,56	2,75	2,71	2,68	Basis
P. Jasa Pendidikan	0,83	0,86	0,85	0,87	0,90	0,86	Non Basis
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2,60	2,60	2,39	2,39	2,59	2,51	Basis
R,S,T,U Jasa lainnya	0,78	0,76	0,79	0,80	0,84	0,80	Non Basis

Sumber: Data diolah,2023

a. Sektor Basis

Berdasarkan hasil perhitungan *location quotient* Provinsi Aceh, dapat dilihat bahwa dari tahun 2018-2022 terdapat 8 sektor yang menjadi sektor unggulan atau sektor basis. dimana sektor tersebut mampu mengeksport ke wilayah lain. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, menjadi sektor basis dengan nilai tertinggi yaitu 2,68%. sektor ini sangat prospek jika dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah. sektor ini cenderung meningkat selama periode tahun 2018-2022 dan mengalami kontraksi selama tahun 2020 dikarenakan wabah covid, lalu pada tahun 2021 PDRB kembali meningkat.

Sektor Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap kenaikan PDRB dalam beberapa tahun terakhir dengan nilai kenaikan yaitu 2,51%.

Sedangkan Sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan penyumbang terbesar ketiga terhadap kenaikan PDRB dalam beberapa tahun terakhir dengan nilai tertinggi yaitu 2,24%. Hal ini dikarenakan Provinsi Aceh memiliki lahan pertanian yang cukup luas yaitu 4.440.066 ha, Provinsi Aceh juga memiliki 96.813 orang nelayan dengan hasil perolehan ikan yang ditangkap sebesar 309.073 ton pada tahun 2022. serta banyak masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sehingga membuat sektor ini menjadi sektor basis dengan nilai LQ 28,02%. Kontribusi sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan cenderung stabil selama 5 (lima) tahun terakhir, dikarenakan sebagian besar masyarakat Provinsi Aceh berprofesi sebagai petani dan nelayan. Sektor ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian Provinsi Aceh. Pemerintah setempat harus memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi berbagai macam masalah Petani dan nelayan serta menyediakan input untuk mengembangkan sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan di masa yang akan datang. Sektor ini harus dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal agar dapat memberikan output yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui upaya ekstensifikasi yang berkeadilan dan tetap mempertimbangkan keseimbangan ekosistem.

Upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan rehabilitas kebun dan lahan kritis untuk meningkatkan produktivitas sumber daya alam serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perkebunan. Intensifikasi juga perlu dilakukan supaya dapat meningkatkan produktivitas lahan serta harus ada upaya

revitalisasi pertanian guna mendorong perbaikan jumlah dan mutu produksi. Pembangunan sektor kehutanan dapat dilakukan melalui peningkatan produksi, efisiensi dan nilai tambah serta peningkatan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan kehutanan diarahkan untuk pengembangan kawasan usaha tani secara komprehensif dan terpadu dengan mengembangkan komoditas unggulan lokal. Untuk mengembangkan subkategori perikanan, maka perlu adanya daya dorong keterpaduan konektivitas yang mampu mempercepat lajunya pertumbuhan. Pengembangan industrialisasi melalui subkategori kelautan dan perikanan harus difokuskan pada penanganan hasil tangkapan maupun budidaya dengan beberapa kebutuhan, diantaranya adalah: ruang penyimpanan ikan (*cool room*), sarana pengolahan hasil tangkapan/ budidaya, serta pabrik pembuat tepung ikan serta pabrik pakan ikan. Pemerintah juga harus memperbaiki sistem pengelolaan potensi sumber daya alam sehingga dapat saling menguntungkan semua pihak. Langkah-langkah seperti ini harus menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah dan tercantum secara jelas dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

b. Sektor Non Basis

Berdasarkan hasil perhitungan indeks LQ yang disajikan pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa terdapat 9 sektor non basis di Provinsi Aceh yaitu, sektor Sektor Industri pengolahan, sektor Pengadaan listrik dan gas, sektor Pengadaan air, sektor Penyediaan akomodasi makan dan minum, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan, sektor Jasa Perusahaan, sektor Jasa Pendidikan, dan sektor Jasa lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pada sektor tersebut di

Provinsi Aceh belum mampu memenuhi sendiri kebutuhannya dan memungkinkan untuk mengimpor dari luar daerah. Sektor Pengadaan Listrik, sektor Industri Pengolahan, dan sektor Jasa Perusahaan merupakan sektor dengan nilai LQ terkecil. Rendahnya nilai LQ untuk 3 sektor di Provinsi Aceh memberi pesan bahwa perlu adanya evaluasi kebijakan yang tepat dan harus memperhatikan kembali 3 sektor yang belum menjadi sektor basis melalui akselerasi berbagai program dan kegiatan yang tepat, serta penganggaran pembangunan yang memadai supaya dapat dikembangkan dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

4.3.4 *Clustering* daerah di Aceh berdasarkan Analisis Typologi Klassen

Meskipun angka ketimpangan antar daerah di Aceh mengalami tren penurunan, masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang secara perkembangan ekonominya perlu mendapatkan perhatian khusus. Dengan menggunakan dua indikator ekonomi utama yaitu PDRB per kapita dan tingkat pertumbuhan ekonomi (periode 2018-2020), dapat dilakukan klasifikasi atau pemetaan daerah berdasarkan Analisis *Typologi Klassen*. Analisis *Typologi Klassen* digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Struktur daerah akan dibagi menjadi empat kuadran yaitu antara lain Daerah Maju dan Cepat Tumbuh (Kuadran I), Daerah Berkembang Cepat (Kuadran II), Daerah Maju Tapi Tertekan (Kuadran III), dan Daerah Tertinggal (Kuadran IV).

daerah yang termasuk dalam kategori ini, yaitu Kab. Aceh Barat, dan Kota Lhokseumawe. Imbas dari habisnya produksi gas alam di Arun membuat kedua daerah ini masuk kategori tertekan, meskipun secara PDRB per kapita masih termasuk tinggi. Arun diharapkan dapat menjadi alternatif bangkitnya ekonomi 2 daerah tersebut.

Daerah tertinggal, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota. Terdapat 3 daerah yang termasuk dalam kategori ini, yaitu Kab. Aceh Tamiang, Kab. Aceh Barat Daya, dan Kab. Aceh Timur. Tiga daerah ini seharusnya mendapat perhatian khusus dalam pembangunan di Aceh, baik melalui stimulus fisik, maupun kebijakan-kebijakan lain dalam hal pembangunan sektor-sektor potensial.

4.3.5 Hasil Analisis Spasial

4.3.5.1 Hasil Analisis Moran Scatterplot

Hasil analisis Moran's I ditampilkan dalam bentuk Diagram Scatterplot, seperti terlihat pada gambar 4.3. Gambar 4.3 menunjukkan nilai indeks morannya 0.16910, nilai ini lebih mendekati nilai nol dan jauh dari angka 1, artinya nilai keterkaitan/ketergantungan (dependensi) spasialnya masih sangat rendah. Uji Hipotesis Global Moran Penelitian ini menggunakan kesimpulan uji hipotesis bahwa Hipotesis nol (H_0) yang menyatakan "Tidak ada autokorelasi (dependensi) spasial antar Kabupaten/Kota dalam hal sektor Pertanian Peternakan Kehutanan dan Perikanan" dan Hipotesis alternatif (H_1) yang menyatakan "Ada Autokorelasi

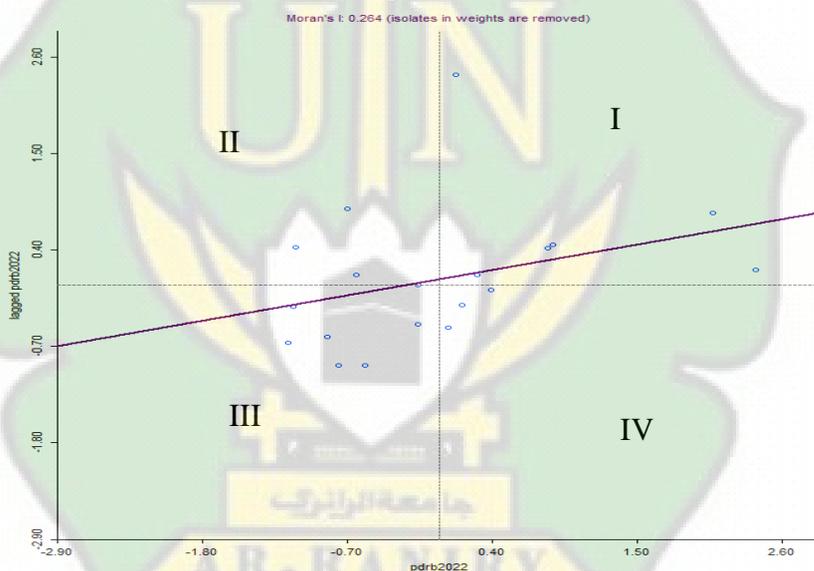
(dependensi) spasial antar Kabupaten/kota dalam hal sektor Pertanian Peternakan Kehutanan dan Perikanan”. Data yang digunakan sebagai sampel adalah data PDRB kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh dari tahun 2018-2022.

Hipotesis pada statistik uji Moran’s I adalah :

$H_0 : I = 0$ (tidak ada autokorelasi antar lokasi)

$H_1 : I \neq 0$ (ada autokorelasi antar lokasi)

Gambar 4.3 Output Moran’s PDRB



Sumber: Data diolah dari GEODA

Berdasarkan hasil penelitian diatas, Nilai Moran’s dari variable PDRB pada tahun 2022 bernilai positif $0.264 > 0$ menunjukkan bahwa pola data membentuk kelompok (*Cluster*). Menunjukkan bahwa interaksi spasial ketenagakerjaan yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh pada tahun 2018-2022 mengalami interaksi spasial ekonomi yang lemah. Hasil penelitian mengenai

interaksi spasial ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dapat dilihat pada gambar dibawah ini menunjukkan bahwa signification map pada signifikansi $p < 0,05$. Hasil penelitian mengenai interaksi spasial ekonomi antar Kabupaten/Kota tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan nilai signifikansi pada $\alpha = 5\%$. Perhitungan uji hipotesis menggunakan nilai P-value dan Zhitung (z-value). Ketika $P\text{-value} < \alpha$ dan $|Zhitung| > Z\alpha/2$, maka kesimpulannya akan menolak H_0 dan menerima H_1 , yang berarti “ada autokorelasi (dependensi) spasial ekonomi antar kabupaten/kota. Berdasarkan output diagram randomization GEODA menunjukkan nilai pseudo P-value adalah $0.03 < \alpha = 0.05$ dan nilai Zhitung (z-value) adalah $2,3936 > Z\alpha/2 = 2.19$, maka kesimpulannya adalah H_0 ditolak dan menerima H_1 , ada autokorelasi spasial ekonomi (dependensi) antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

4.3.5.2 Hasil Analisis Histogram

Penelitian ini menggunakan kesimpulan uji hipotesis bahwa hipotesis nol (H_0) yang menyatakan “tidak ada autokorelasi (dependensi) spasial ekonomi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh”, dan Hipotesis alternatif (H_1) yang menyatakan “ada autokorelasi (dependensi) spasial ekonomi antar Kabupaten/kota di Provinsi Aceh”. Penelitian ini menggunakan nilai signifikansi pada $\alpha = 5\%$. Perhitungan uji hipotesis menggunakan nilai P-value dan Z-value.

Jika $P\text{-value} < \alpha$ dan $|Z_{hitung}| > Z_{\alpha/2}$, maka kesimpulannya akan menolak H_0 dan menerima H_1 , yang berarti “ada autokorelasi (dependensi) spasial ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Berdasarkan output Histogram GEODA, menunjukkan nilai P-value adalah $0.03 < \alpha = 0.05$ dan nilai Z-value adalah $1,946 > Z_{\alpha/2} = 1.77$, maka kesimpulannya adalah H_0 ditolak dan menerima H_1 , yang artinya “ada autokorelasi (dependensi) spasial ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh”.

Gambar 4.4
Histogram Tingkat PDRB Provinsi Aceh

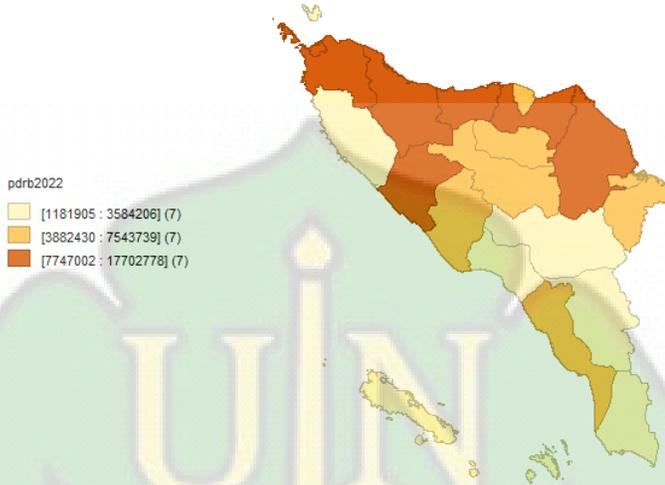


Sumber: Data diolah dari GEODA

Dari Histogram diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa apabila nilai $I > I_0$, maka data memiliki autokorelasi positif, jika $I < I_0$ maka data memiliki autokorelasi negatif. Dari hasil analisis, diperoleh nilai Indeks Moran’s $I = 1.946$ lebih besar dari nilai ekspektasi moran’s $I (I_0) = -0,123$. Maka kesimpulan yang di ambil adalah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh memiliki autokorelasi positif.

Gambar 4.5

Peta Persebaran PDRB Provinsi Aceh



Sumber: Data diolah dari GEODA

Nilai persebaran PDRB pada peta di atas terbagi tiga yaitu, nilai PDRB tinggi, sedang, dan rendah dengan pembagian wilayah sebagai berikut :

1. Nilai PDRB tinggi yaitu antara Rp.7747002,64 – Rp.17702778,17 yang terdiri atas 7 wilayah: Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie, dan Kota Banda Aceh.
2. Nilai PDRB sedang yaitu antara Rp.3882430,96 – Rp.7543739,09 yang terdiri atas 7 wilayah: Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kota Lhokseumawe, dan Kota Langsa.
3. Nilai PDRB rendah yaitu antara Rp.1181905,79 –

Rp.3584206,08 yang terdiri atas 9 wilayah: Kota Sabang, Kota Subulussalam, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Tenggara.

Nilai tersebut menjelaskan bahwa ada hubungan autokorelasi positif antar Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh, dimana persebaran data secara mengelompok (*clustered*) terlihat pada wilayah yang memiliki nilai PDRB tinggi dan berdekatan atau dikelilingi oleh wilayah yang memiliki nilai PDRB tinggi pula, Begitu juga dengan Sebaliknya.

Gambar 4.6

Demografi Keterkaitan Spasial Ekonomi Provinsi Aceh



Sumber: Data diolah dari GEODA

Berdasarkan Gambar 4.5, kita dapat melihat *Connectivity* atau keterkaitan spasial dari masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh. Analisis keterkaitan spasial dilakukan terhadap

sektor ekonomi yang menjadi prioritas pertama untuk dikembangkan di masing-masing Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Hasil analisis keterkaitan spasial berupa nilai indeks *morans* yang mengidentifikasi adanya keterkaitan spasial ekonomi antar wilayah. Dengan menggunakan analisis *Software* GEODA yang mengidentifikasi adanya pola *cluster* yang membentuk kawasan *Hot-Spot* dan *Cold-Spot* serta *Linear Connectivity* di masing-masing Kabupaten/Kota. Kawasan *Hot-Spot* terdiri atas wilayah dengan nilai total PDRB yang tinggi. Sedangkan Kawasan *Cold-Spot* terdiri atas wilayah dengan nilai total PDRB yang rendah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang didapatkan melalui analisis *Typologi Klassen, Shift-Share dan Location Quotient*, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yang berkenaan dengan penelitian ini yaitu:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada 8 sektor unggulan yang ada di Provinsi Aceh, hal ini sesuai dengan kontribusi terhadap kenaikan PDRB Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2018-2022. Adapun sektor yang masuk dalam Kuadran I (Sektor Maju dan tumbuh dengan cepat) adalah: Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Sektor Konstruksi, dan Sektor Real Estate. Hasil dari analisis *Shift-Share*, Nilai Total (Dij) sebesar 14.123.150 triliun Rupiah menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2018-2022 perekonomian Provinsi Aceh mengalami pertambahan nilai absolut atau mengalami kenaikan kinerja perekonomian daerah sebesar 14.123.150 triliun Rupiah Peningkatan ini disumbangkan oleh semua sektor ekonomi, Ada lima sektor ekonomi yang menjadi penyumbang terbesar yakni: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Informasi dan Komunikasi, Pertambangan dan Penggalian, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil

dan Sepeda Motor, dan Konstruksi.

2. Hasil Output Moran's I, menjelaskan bahwa ada hubungan autokorelasi positif antar Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh, dimana persebaran data secara mengelompok (clustered) terlihat pada wilayah yang memiliki nilai PDRB tinggi dan berdekatan atau dikelilingi oleh wilayah yang memiliki nilai PDRB tinggi pula. Ini Berdasarkan output diagram randomization GEODA menunjukkan nilai pseudo P-value adalah $0.03 < \alpha = 0.05$ dan nilai Zhitung (z-value) adalah $2,3936 > Z_{\alpha/2} = 2.19$, maka kesimpulannya adalah H_0 ditolak dan menerima H_1 , ada autokorelasi spasial ekonomi (dependensi) antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, berikut beberapa saran dari peneliti bagi pemerintah maupun pihak lainnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah
 - a. Sektor ekonomi di Provinsi Aceh harus lebih optimal dikembangkan lagi melalui strategi pembangunan ekonomi yang cepat, tepat, dan akurat. Sehingga potensi ekonomi di Provinsi Aceh dapat tumbuh dan terus memberikan kontribusi serta dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.
 - b. Disamping itu pula, disarankan kepada pemerintah agar memprioritaskan untuk mengembangkan semua sektor-

sektor, dan tidak fokus terhadap sektor yang memiliki kontribusi paling besar terhadap Pertumbuhan PDRB Provinsi Aceh, mengingat antara satu sektor dengan sektor lainnya yang saling keterkaitan. Cara ini dilakukan agar sektor-sektor ekonomi yang lain dapat pula tersinergikan sehingga pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh bisa lebih merata kedepannya.

2. Bagi Akademis

- a. Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan metode lain dalam meneliti sektor unggulan yang ada di Provinsi Aceh agar penelitian yang berkaitan dengan sektor unggulan dan keterkaitan spasial ekonomi memiliki hasil yang lebih beragam dan memperoleh gambaran dari sudut pandang yang berbeda.
- b. Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan tahun penelitian dan data terbaru. Agar dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan sektor unggulan serta PDRB antar Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang lebih detil lagi. Serta diharapkan juga kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan data lain diluar dari penelitian ini, seperti data pariwisata, inflasi, ekspor-impor dan lainnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2019). *Globalisation, Economic Growth, and Spillovers: A Spatial Analysis*. Margin, 13(3), 255–276. <https://doi.org/10.1177/2347631119841257>
- A, Kusumangdiyah. (2022). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Temanggung Berbasis Sektor Unggulan*. jurnal kajian ilmu dan pendidikan geografi, 12.
- Anselin, L. (2010). *Thirty years of spatial econometrics*. *Papers in Regional Science*, 89(1), 3–25. <https://doi.org/10.1111/j.1435-5957.2010.00279.x>
- Anselin, L. (2016). *GeoDa Workshop Part 2*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018,2019,2020,2021,2022. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh-Indonesia*
- Basuki, Mahmud, & Febri Nugroho Mujiraharjo. 2017. “*Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Sleman Dengan Metode Shift Share Dan Location Quotient Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Sleman Dengan Metode Shift Share Dan Location Quotient*”. *Jurnal Sains, Teknologi dan Industri* 15: 2–10.
- Fikri, Muhammad Tsaqibul (2017). *Sektor Unggulan dan Keterkaitan Spasial Antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. *Jurnal Universitas Negeri Semarang Jurusan Ekonomi Pembangunan*.
- Gulo, Yarman, 2015. “*Identifikasi Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Wilayah Pendukungnya Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Nias*”. Dinas Tata Ruang, Perumahan, dan Kebersihan, Kabupaten Nias
- Hidayat, Muhammad, & Ranti Darwin. 2017. “*Analisis Sektor Unggulan Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti*.” *media trend* 12(2): 156.
- H, Sundaro. (2022). *Analisis Sektor-Sektor Unggulan Kabupaten Demak*. *Indonesian Journal of Spatial Planning*, 9.

- Hasan, I. (2018). *Analisis Sektor Ekonomi Unggulan dalam Pembangunan Daerah Kota Jambi*. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja.
- Herath, J. T. (2011). *A dynamic Shift Share Analysis of Economic Growth in West Virginia*. Journal of Rural and Community Development.
- Irsyad M, S. S. (2018). *Interaksi Spasial Ekonomi di Indonesia*. jurnal ilmiah mahasiswa FEBI unsyah, 9.
- Khasanah, N. (2016). *Peranan Sektor Unggulan dalam Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi*. Riau: Universitas Islam Riau.
- Komang, E. N. (2011). *Analisis Pola Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Potensial Kabupaten Klungkung*. Bali: Universitas Udayana.
- Lincoln, A. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Luthfi, M. (2013). *Penataan Ruang Wilayah dan Kota*. Yogyakarta: UGM.
- Miroah, Chumaidatul. 2015. "Analisis Penentuan Sektor Unggulan Kota Semarang Melalui Pendekatan Tipologi Klassen." : 30–32.
- Marisa Saputri, F. A. (2022). *Analisis Sektor Unggulan Metode Analisis Location Quotient di Kabupaten Bireun*. jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi islam, 19.
- Nisa, I., Karim, A., & Wasono, R. (2017). *Pemodelan Spatial Durbin Error Model (SDEM) Pada Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Jawa Tengah*, 5(1).
- Nurlina T, M. I. (2017). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan di Provinsi Aceh*. Jurnal Samudra Ekonomika, 175-179.
- Pamungkas, C. P. (2009). *Analisis spasial keterkaitan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan di jawa timur*. Jurnal Riset Ekonomi, 1(3), 201–217.

- Miranda, A. (2022). *Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Terapan (Sinta) VI 202225 April*, Jurnal Fakultas Mipa Universitas Sam Ratulangi, 8-10
- Poros Malino, O. A. (2019). *Keterkaitan Spasial Antar Wilayah Berdasarkan Potensi Ekonomi. Jurnal Wilayah dan Kota Maritim*, 9.
- Purba, O. N. (2016). *Pemodelan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara dengan Pendekatan Ekonometrika Spasial Data Panel*, 5(2).
- Prasetyo, R. B. (2014). Dengan Software : *OpenJump OpenGeoDa*.
- Rahmawati, R., Safitri, D., & Fairuzdhiya, O. U. (n.d.). *Analisis Spasial Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia*. Media Statistika, 8 No 1, 23–30.
- Robinson, T. (2007). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Romzi, Kurniasari, Yuniarti. 2011. *Analisis Dampak Spasial pada Peramalan Perekonomian dan Ketengakerjaan*. Badan Pusat Statistika, Jakarta
- Rustiadi, Ernan, Dkk. 2011. “*Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*”, Yayasan Pustaka Obor Rakyat, Jakarta
- Sanjaya, M., & Riska, S. (2012). *Pemodelan Data Panel Spasial Dengan Dimensi Ruang Dan Waktu*, 17(1), 6–14.
- S., Sukirno. (2015). *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sirojuzilam. (2008). *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Timur Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Suhada. (2018). *Peranan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Indragiri Hulu*. Riau: Universitas Islam Riau.
- Sun'an, M. (2015). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Widodo, T. (2006). *Modul Praktikum Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Program Diploma Fakultas Ekonomi UGM.
- Wiratna, S. V. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Zhukof, Y., *Spatial Autocorrelation*, IQQS, Harvard University, Amerika, 2010.



LAMPIRAN

**Tabel 4.3 Peranan Produk Domestik Regional Bruto
Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut
Lapangan Usaha 2018-2022 (Persen)**

No	Kategori Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,03	3,39	3,48	0,35	3,31
2.	Pertambangan dan Penggalian	6,66	5,86	8,22	-0,95	4,30
3.	Industri Pengolahan	8,26	-1,10	-4,43	2,53	4,19
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	7,55	6,88	2,78	-0,21	2,44
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,19	24,20	-2,87	2,54	9,83
6.	Konstruksi	2,74	5,16	10,61	-0,46	-2,36
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,05	3,01	-5,34	4,23	6,36
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,67	2,96	-28,44	19,51	7,24
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan- Minum	8,28	6,73	-7,63	-6,11	32,40
10.	Informasi dan Komunikasi	2,23	5,26	11,58	7,57	11,25
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,87	12,58	0,55	-5,08	5,93
12.	Real Estat	6,09	6,87	-1,19	4,06	3,98
13.	Jasa Perusahaan	6,61	5,83	-3,19	0,26	11,56
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,28	3,18	-3,31	6,38	0,06
15.	Jasa Pendidikan	7,94	8,65	3,47	1,23	3,83
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,79	7,52	4,48	9,71	9,81
17.	Jasa Lainnya	5,33	7,24	1,47	2,23	13,59
18.	Total PDRB	4,61	4,14	-0,37	2,79	4,21

Sumber: BPS Provinsi Aceh

PDRB Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha 2018-2022 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	35426160.89	36626711.53	37899516.74	37768075.79	39018087.95
B. Pertambangan dan Penggalian	9152505.80	9688837.09	10485331.42	10385698.66	10831941.95
C. Industri Pengolahan	6410262.95	6339510.29	6058651.82	6212088.19	6472363.28
D. Pengadaan Listrik dan Gas	197867.55	211485.51	217370.93	216905.40	222194.91
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	41541.90	51596.46	50114.50	51384.98	56435.21
F. Konstruksi	11949476.38	12566589.31	13900437.92	13837071.93	13511019.28
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19730312.08	20324490.32	19238225.08	20051152.97	21327340.40
H. Transportasi dan Pergudangan	9577626.56	9861282.06	7056686.62	8433303.40	9043700.75
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1672914.05	1785442.75	1649236.89	1548498.33	2052342.92
J. Informasi dan Komunikasi	4401241.37	4632574.78	5187367.38	5580292.63	6207924.73
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2081247.09	2342969.55	2355954.79	2236321.67	2103703.52
L. Real Estate	5156645.15	5510998.28	5445678.21	5666649.17	5892358.62
M,N. Jasa Perusahaan	820692.64	868548.70	840807.26	842987.55	940450.97
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11486169.89	11851143.69	11459041.15	12190187.53	12182577.39
P. Jasa Pendidikan	3248116.57	3529028.38	3651645.76	3696475.61	3838077.34
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3712298.46	3991557.57	4170438.15	4575346.61	5023974.76
R,S,T,U. Jasa lainnya	1759412.10	1886804.53	1914462.53	1957153.42	2223149.61
Produk Domestik Regional Bruto	126824491.42	132069570.80	131580967.16	135249593.84	140947643.60

PDRB Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha 2018-2022 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	46365383.16	48438862.87	51547875.58	55611319.19	62311536.01
B. Pertambangan dan Penggalian	7777316.21	7900305.42	7410185.70	12305335.02	21162764.65
C. Industri Pengolahan	8117099.60	7777001.58	7592980.35	9314184.19	10874889.67
D. Pengadaan Listrik dan Gas	209657.05	225881.13	227463.81	227791.88	238189.26
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	67666.24	84240.00	82246.34	85394.92	94705.39
F. Konstruksi	14622782.53	15789987.12	17757382.83	18307604.39	19053278.78
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24671449.32	25468961.96	24603417.11	26460614.02	29361356.50
H. Transportasi dan Pergudangan	10326885.72	10589856.41	7648935.29	9489888.22	11497638.59
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2502673.94	2775750.13	2646615.47	2527315.26	3574505.14
J. Informasi dan Komunikasi	4416080.06	4671641.04	5189847.64	5566520.30	6202613.23
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3067894.60	3506286.96	3510635.07	3527518.36	3622214.21
L. Real Estate	6534111.82	7159276.17	7165319.32	7525765.00	8131680.82
M,N. Jasa Perusahaan	988515.80	1065141.28	1058257.88	1099768.57	1342921.60
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15764965.25	16831192.86	17076152.94	19049086.44	18754544.69
P. Jasa Pendidikan	4211128.23	4899920.95	5244235.20	5507883.02	5776939.69
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4102487.26	4618436.97	5136307.84	5795759.36	6801165.62
R,S,T,U. Jasa lainnya	2165018.54	2360185.31	2474462.38	2574553.43	2949075.59
Produk Domestik Regional Bruto	155911115.34	164162928.19	166372320.74	184976301.57	211750019.42

Tabel 4.4 Hasil Pengolahan Data Analisis Typologi Klassen Sektor Unggulan Provinsi Aceh 2018-2022

Sektor LapanganUsaha	Provinsi Aceh		Nasional	
	(S)	(Sk)	(Si)	(Ski)
Petanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,03	0,28	0,02	0,13
Pertambangan dan Penggalian	0,04	0,08	0,02	0,07
Industri Pengolahan	0,01	0,05	0,02	0,21
Listrik dan Gas	-0,34	0,00	0,03	0,01
Pengadaan Air, PengelolaanSampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,00	0,05	0,00
Kontruksi	0,02	0,10	0,02	0,10
Perdagangan Besar dan Eceren; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,03	0,15	0,03	0,13
Transportasi dan Pergudangan	0,02	0,07	0,04	0,04
Penyediaan Akomodasi danMakanan Minum	0,12	0,01	0,03	0,03
Informasi dan Komunikasi	0,09	0,04	0,09	0,06
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,01	0,02	0,03	0,04
Real Estate	0,04	0,04	0,03	0,03
Jasa Perusahaan	0,05	0,01	0,04	0,02
Admistrasi Pemerintahan, Pertahanan dan JaminanSosial Wajib	0,01	0,09	0,02	0,03
Jasa Pendidikan	0,04	0,03	0,02	0,03
jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,08	0,03	0,08	0,01
Jasa Lainnya	0,08	0,01	0,05	0,02

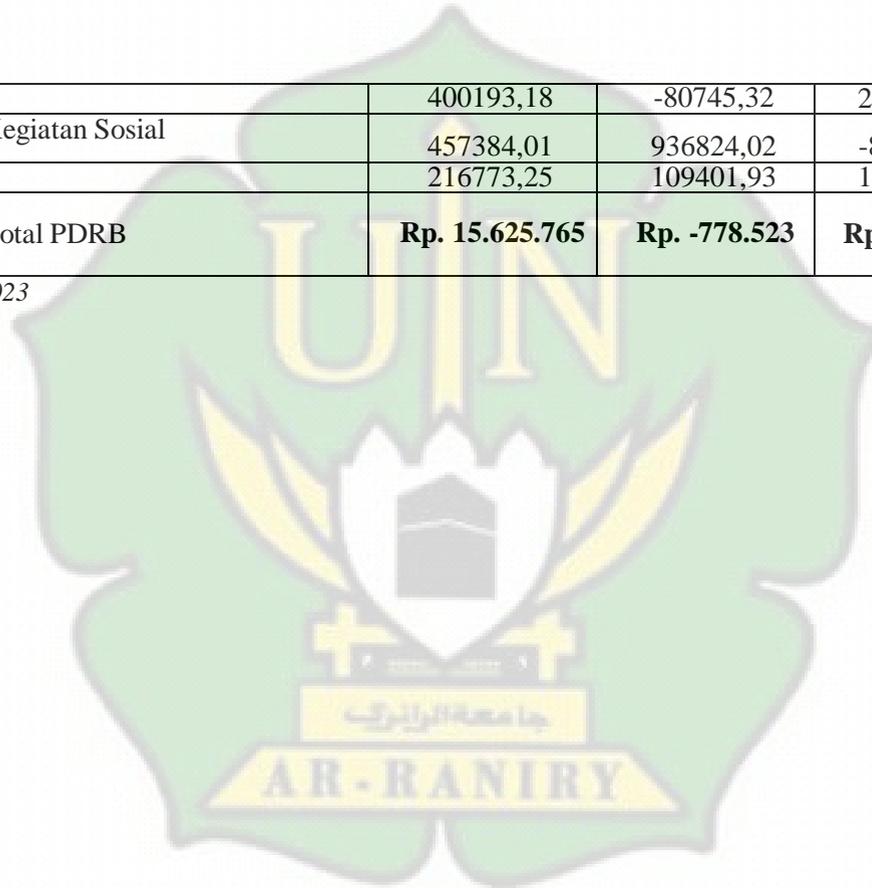
Sumber: Data diolah,2023

Tabel 4.6 Hasil Analisis *Shift-Share* Provinsi Aceh Dalam Milyaran Rupiah Tahun 2018-2022

Sektor Lapangan Usaha	2018-2022			
	Nij	Mij	Cij	Dij
Petanian, Kehutanan, dan Perikanan	4364778,68	-879757,66	106905,99	3591927
Pertambangan danPenggalian	1127659,86	-419353,50	971129,64	1679436
Industri Pengolahan	789794,18	-195826,54	-531866,63	62101
Pengadaan Listrik dan Gas	24378,75	3965,28	-4017,04	24327
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5118,17	3807,05	5968,77	14894
Kontruksi	1472268,46	-598440,18	687714,72	1561543
Perdagangan Besar dan Eceren; Reparasi Modildan Sepeda Motor	2430928,02	-238376,58	-595523,44	1597028
Transportasi dan Pergudangan	1180038,08	-46174,37	-1667789,70	-533926
Penyediaan Akomodasidan Makanan Minum	206116,03	-31559,91	204871,88	379428
Informasi dan Komunikasi	542267,15	1186550,82	77865,03	1806683
Jasa Keuangan dan Asuransi	256425,83	33988,30	-267958,13	22456
Real Estat	635338,80	42111,03	58263,17	735713
Jasa Perusahaan	101115,64	15666,95	2975,41	119758
Admistrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1415185,43	-620604,58	-98172,85	696408

Jasa Pendidikan	400193,18	-80745,32	270513,15	589961
jasa Kesehatan danKegiatan Sosial	457384,01	936824,02	-82532,03	1311676
Jasa Lainnya	216773,25	109401,93	137561,82	463737
Total PDRB	Rp. 15.625.765	Rp. -778.523	Rp. -724.090	Rp. 14.123.150

Sumber: Data diolah,2023

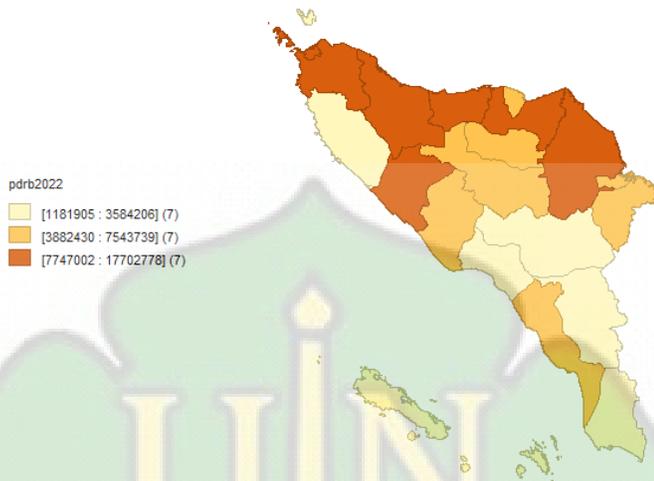


Tabel 4.7 Hasil Analisis Location Quotient

Kategori Lapangan Usaha	LQ 2018	LQ 2019	LQ 2020	LQ 2021	LQ 2022	Rata-rata	Keterangan
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2,23	2,24	2,24	2,21	2,26	2,24	Basis
B. Pertambangan & Penggalian	0,94	1,00	1,08	1,04	1,05	1,02	Basis
C. Industri Pengolahan	0,24	0,23	0,22	0,22	0,22	0,23	Non Basis
D. Pengadaan Listrik, Gas	0,15	0,16	0,16	0,16	0,02	0,13	Non Basis
E. Pengadaan Air	0,41	0,48	0,43	0,43	0,46	0,44	Non Basis
F. Konstruksi	0,94	0,94	1,06	1,03	1,00	1,0	Basis
G. Perdagangan Besar & Eceran, & Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1,18	1,17	1,13	1,14	1,16	1,15	Basis
H. Transportasi & Pergudangan	1,81	1,77	1,46	1,71	1,54	1,66	Basis
I. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0,44	0,44	0,45	0,41	0,49	0,45	Non Basis
J. Informasi & Komunikasi	0,67	0,65	0,65	0,66	0,69	0,66	Non Basis
K. Jasa Keuangan	0,41	0,44	0,42	0,40	0,37	0,41	Non Basis
L. Real Estate	1,41	1,44	1,37	1,40	1,44	1,41	Basis
M,N Jasa Perusahaan	0,36	0,35	0,35	0,35	0,36	0,35	Non Basis
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & JSW	2,70	2,69	2,56	2,75	2,71	2,68	Basis
P. Jasa Pendidikan	0,83	0,86	0,85	0,87	0,90	0,86	Non Basis
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2,60	2,60	2,39	2,39	2,59	2,51	Basis
R,S,T,U Jasa lainnya	0,78	0,76	0,79	0,80	0,84	0,80	Non Basis

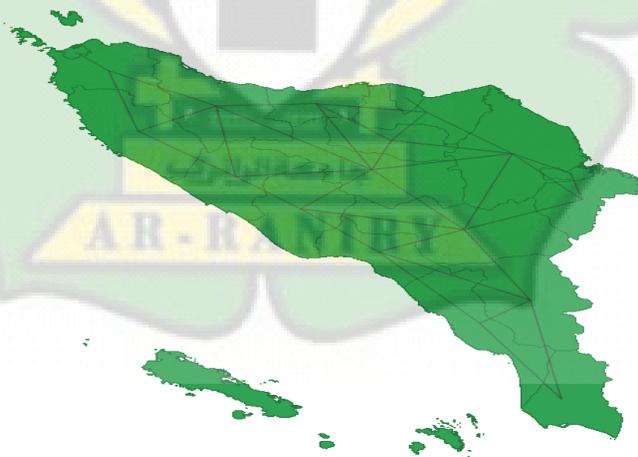
Sumber: Data diolah,2023

Gambar 4.4 Peta Persebaran PDRB Provinsi Aceh



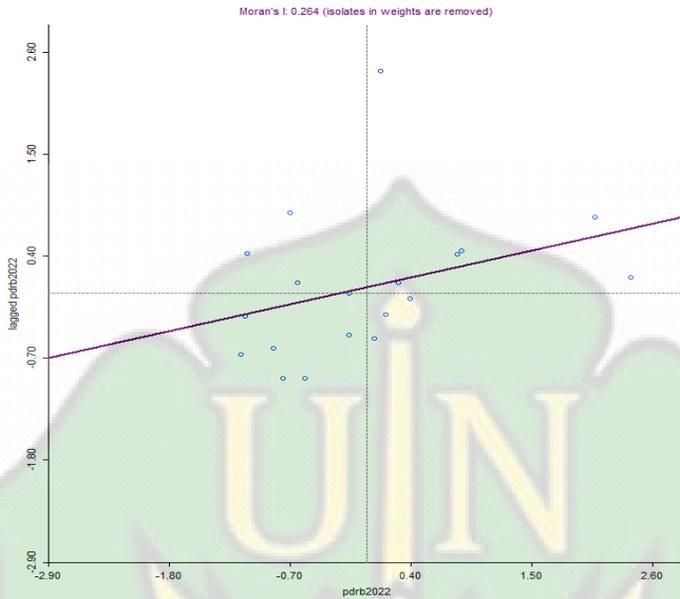
Sumber: Data diolah dari GEODA

Gambar 4.5 Demografi Keterkaitan Spasial Ekonomi Provinsi Aceh



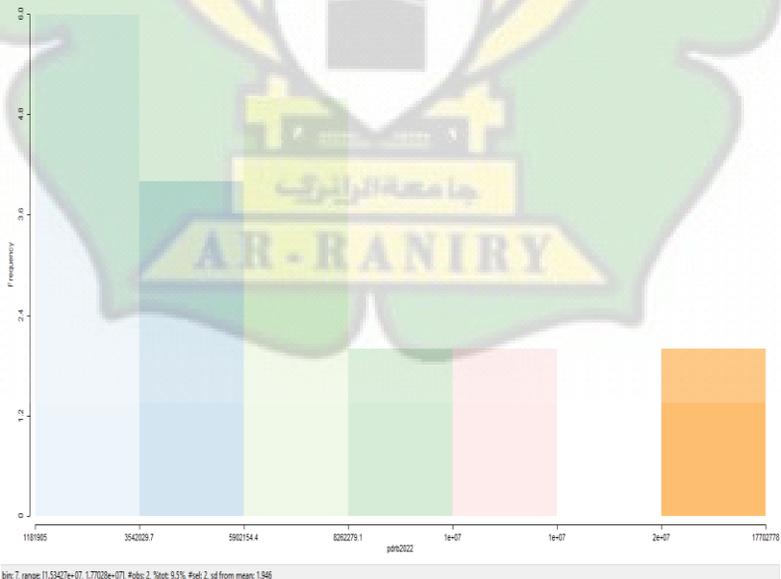
Sumber: Data diolah dari GEODA

Gambar 4.2 Output Moran's PDRB



Sumber: Data diolah dari GEODA

Gambar 4.3 Histogram Tingkatan PDRB Provinsi Aceh



Sumber: Data diolah dari GEODA